

Katalog BPS : 4103.7371

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA MAKASSAR 2015



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA MAKASSAR**

<https://makassar.bps.go.id>

## **KATA PENGANTAR**

### **BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAKASSAR**

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015 disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di Kota Makassar. Selain itu, juga diharapkan sebagai bahan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan khususnya di bidang sosial.

Publikasi ini memuat berbagai indikator antara lain, Indikator Kependudukan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan, dan Perumahan. Indikator-indikator tersebut, secara umum dapat menggambarkan tingkat Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar.

Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memuaskan semua konsumen data. Saran yang konstruktif tetap diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Makassar, September 2015

**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA MAKASSAR**  
Kepala,

**H. ABD. HARIS, SE.**  
**NIP. 196612311993011001**

---

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMBUTAN WALIKOTA MAKASSAR</b>	i
<b>KATA PENGANTAR BPS</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	v
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	viii
<b>1. Pendahuluan</b>	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	2
1.3. Ruang lingkup	2
1.4. Konsep dan Defenisi	3
1.5. Sumber Data	7
1.6. Sistematika Penulisan	8
<b>2. Kependudukan</b>	9
2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	9
2.2 Pertumbuhan Penduduk	11
2.3 Penyebaran Penduduk	11
2.4 komposisi Penduduk dan Beban Tanggungan	14
2.5 Sex Ratio	16
2.6 Status Perkawinan	17
2.7 Formasi Keluarga	19
<b>3. Fertilitas dan Keluarga Berencana</b>	22
3.1 Usia Perkawinan Pertama	22
3.2 Jumlah Anak yang dilahirkan Hidup	23
3.3 Pemakaian alat/Cara KB	24

---

<b>4. Kesehatan</b>	27
4.1 Status Kesehatan Masyarakat	27
4.2 Keluhan Kesehatan	28
4.3 Lama Hari sakit	28
4.4 Penolong persalinan	30
4.5 Pemberian ASI	31
4.6 Sarana Kesehatan	32
<b>5. Pendidikan</b>	34
5.1. Sarana Pendidikan	34
5.2. Rasio Murid Guru	35
5.3. Rasio murid Sekolah	36
5.4 . Angka Partisipasi Sekolah	39
5.5. Kemampuan Membaca dan Menulis	40
5.6 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	43
<b>6. Ketenagakerjaan</b>	44
6.1. Penduduk Menurut Jenis Kegiatan	45
6.2. Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran	46
6.3. Lapangan Pekerjaan dan Jenis pekerjaan	47
6.4. Status Pekerjaan	50
6.5. Lama Jam Bekerja	51
<b>7. Perumahan</b>	53
7.1 Status Penguasaan Rumah	53
7.2 Kondisi Fisik Bangunan Tempat Tinggal	55
7.3 Fasilitas Tempat Tinggal	59
7.3.1 Fasilitas Sumber Air Minum	59
7.3.2 Fasilitas Buang Air Besar	61
7.3.3 Fasilitas Penerangan	62
<b>8. Indikator Lainnya</b>	64
8.1 Penduduk menurut golongan dan pengeluaran perkapita	64
8.2 Kemiskinan	66
<b>Lampiran</b>	71
<b>Daftar Pustaka</b>	83

---

---

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penduduk Kota Makassar 2013-2014	10
Tabel 2.2 Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar dan Sulawesi Selatan 2012 dan 2013	11
Tabel 2.3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Makassar 2013	13
Tabel 2.4 Angka Beban Tanggungan Kota Makassar 2013-2014	15
Tabel 2.5 Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio di Kota Makassar 2013-2014	16
Tabel 2.6 Penduduk Usia 10 tahun ke atas menurut status perkawinan di Kota Makassar 2013-2014	18
Tabel 2.7 Persentase Status hubungan dengan Kepala Rumah tangga di Kota Makassar tahun 2013-2014	20
Tabel 3.1 Jumlah dan Persentase Wanita Usia 10 Tahun Ke Atas yang pernah Kawin Menurut Umur Saat Perkawinan Pertama, 2013	23
Tabel 3.2 Jumlah dan persentase wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut jumlah anak lahir hidup tahun 2013-2014	24
Tabel 3.3 Jumlah dan Persentase Wanita Usia 15-49 tahun yang menikah menurut Penggunaan Alat/Cara KB Kota Makassar, 2013-2014	25
Tabel 3.4 Jumlah dan Persentase wanita yang berumur 15-49 tahun yang kawin menurut jenis alat/cara KB yang digunakan di Kota Makassar, 2013-2014	26
Tabel 4.1 Penduduk kota Makassar yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Kota Makassar 2013-2014	28
Tabel 4.2 Penduduk Penderita sakit menurut Jumlah Hari Sakit di Kota Makassar tahun 2013-2014	29
Tabel 4.3 Jumlah Balita Penolong Persalinan terakhir menurut jenis profesi di kota Makassar tahun 2013-2014	30
Tabel 4.4 Persentase anak usia 2-4 tahun yang pernah disusui menurut lama disusui di kota Makassar tahun 2013-2014	32
Tabel 4.5 Banyaknya sarana kesehatan menurut jenisnya di kota Makassar tahun 2013-2014	33
Tabel 5.1 Rasio Murid Guru di Kota Makassar tahun ajaran 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014	35
Tabel 5.2 Rasio Murid Sekolah di Kota Makassar tahun ajaran 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014	36
Tabel 5.3 Rasio Murid Sekolah dan Murid Guru di Kota Makassar 2013	37

Tabel 5.4	Jumlah murid, guru dan Sekolah menurut kecamatan di kota Makassar tahun 2013	38
Tabel 5.5	Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun di Kota Makassar tahun 2013-2014	39
Tabel 5.6	Kemampuan Baca Tulis Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas di Kota Makassar tahun 2013-2014	42
Tabel 5.7	Penduduk usia 10 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan pendidikan yang ditamatkan di kota makassar tahun 2013-2014	43
Tabel 6.1	Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Kegiatan utama selama seminggu yang lalu di kota makassar tahun 2011-2012	45
Tabel 6.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan tingkat Pengangguran terbuka Kota Makassar tahun 2011-2012	46
Tabel 6.3	Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan di kota makassar tahun 2011-2012	48
Tabel 6.4	Distribusi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut jenis pekerjaan di kota makassar tahun 2011-2012	49
Tabel 6.5	Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan di kota Makassar tahun 2012	51
Tabel 6.6	Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut jam kerja seluruhnya di kota Makassar tahun 2012	52
Tabel 7.1	Rumahtangga menurut status Penguasaan Bangunan Tempat tinggal di Kota Makassar tahun 2013-2014	54
Tabel 7.2	Persentase rumahtangga menurut luas lantai Tinggal di kota Makassar tahun 2013-2014	56
Tabel 7.3	Jumlah dan persentase Rumahtangga menurut jenis dinding Terluas di kota Makassar tahun 2013-2014	57
Tabel 7.4	Jumlah dan persentase rumahtangga menurut jenis atap terluas di Kota Makassar tahun 2013-2014	58
Tabel 7.5	Jumlah dan persentase rumahtangga menurut sumber air minum di Kota Makassar tahun 2013-2014	60
Tabel 7.6	Jumlah dan persentase rumahtangga menurut fasilitas tempat buang air besar di Kota Makassar tahun 2013-2014	62
Tabel 7.7	Jumlah dan Persentase rumahtangga menurut fasilitas penerangan di kota Makassar tahun 2013-2014	63
Tabel 8.1	Penduduk menurut Golongan Pengeluaran Perkapita per Bulan di Kota Makassar tahun 2013	65
Tabel 8.2	Pengeluaran perkapita se bulan dan pola konsumsi di Kota Makassar tahun 2013-2014	66
Tabel 8.3	Jumlah Penduduk Miskin, Persentase dan GK tahun 2008-2013	69

---

Lampiran

Tabel 1.	Jumlah Penduduk Pertengahan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kab/Kota Tahun 2011-2013	71
Tabel 2.	Jumlah APS 7-12 tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 Menurut Kab/Kota	72
Tabel 3.	Jumlah APS 13-15 tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 Menurut Kab/Kota	73
Tabel 4.	Jumlah APS 16-18 tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 Menurut Kab/Kota	74
Tabel 5.	Jumlah APS 19-25 tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 Menurut Kab/Kota	75
Tabel 6.	Penduduk Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Laki-Laki Menurut Kab/kota 2012	76
Tabel 7.	Penduduk Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Perempuan Menurut Kab/kota 2012	77
Tabel 8.	Penduduk Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Laki-Laki + Perempuan Menurut Kab/kota 2012	78
Tabel 9.	Penduduk Usia 15+ menurut Indikator Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan menurut TPT dan TPAK tahun 2012	79
Tabel 10.	Jumlah, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Di Sulawesi Selatan Tahun 2013-2014	80

---

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Penduduk menurut Jenis Kelamin Kota Makassar	10
Grafik 2. Distribusi Luas Wilayah dan Penduduk Kota Makassar 2013	14
Grafik 3. Persentase penduduk Kota Makassar menurut Status Perkawinan	19
Grafik 4. Jumlah Sarana Kesehatan menurut jenisnya di Kota Makassar tahun 2012-2013	33
Grafik 6. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan	43
Grafik 7. Persentase rumahtangga menurut Luas Lantai di Kota Makassar tahun 2012-2013	56
Grafik 8. Persentase rumahtangga menurut Jenis dinding Di Kota Makassar tahun 2013	57
Grafik 9. Persentase rumahtangga menurut Jenis Atap terluas di Kota Makassar tahun 2012-2013	59
Grafik 10. Persentase rumahtangga menurut Sumber Air Minum di Kota Makassar tahun 2012-2013	61
Grafik 11. Persentase rumahtangga menurut Sumber Penerangan di Kota Makassar tahun 2012-2013	63
Grafik 12. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Makassar tahun 2008-2013	69

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada dasarnya tujuan pokok dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud tidak hanya menyangkut kemampuan mencukupi kebutuhan yang bersifat materiil (sandang, papan dan pangan), namun juga pemenuhan kebutuhan yang bersifat non materiil (pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan, dll). Dengan pemenuhan kebutuhan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia. Disisi lain sumber daya manusia dalam proses pembangunan dapat menjadi potensi dapat pula menjadi beban pembangunan.

Sejalan dengan pergantian masa dan kepemimpinan, apalagi sejak diterapkannya Undang-undang Otonomi Daerah telah mengubah sistem kebijakan negara ini dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan ini tentunya akan menimbulkan beberapa tantangan dan pertanyaan apakah dengan desentralisasi akan menjamin bahwa kepentingan rakyat banyak akan terpenuhi. Pertanyaan ini akan terjawab bila ada kesepakatan nasional untuk menyamakan persepsi mengenai pembangunan nasional. Dimana kesepakatan itu menjamin bahwa semua rakyat Indonesia sebagai warga negara berhak atas standar pembangunan manusia, seperti baca tulis, mendapat pendidikan yang setinggi-tingginya, hidup sehat, berpenghasilan yang layak, emnghuni rumah yang memadai, beribadah dengan tenang sehingga kita bisa hidup sebagai bangsa dengan damai dan nyaman.

Dalam proses pembangunan senantiasa diupayakan peningkatan kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan juga menikmati hasil pembangunan, dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan yang diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan perlu diukur tingkat keberhasilannya, dan untuk mengukur pelaksanaan

---

pembangunan secara luas yang meliputi unsur perencanaan, pemantauan dan evaluasi, tentunya diperlukan data statistik. Peranan data sangat penting karena data merupakan bahan baku bagi penyusunan statistik/indikator yang digunakan untuk melihat keadaan, memantau dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Disinilah peran serta BPS, khususnya dalam menyediakan data-data statistik yang diperlukan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu survei yang dilaksanakan oleh Badan pusat Statistik (BPS). Survei ini dilaksanakan tiap triwulan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan data yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Data yang dihasilkan dari survei ini meliputi informasi tentang demografi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, keluarga berencana dan kemampuan daya beli masyarakat.

## **1.2 . Tujuan**

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2015 diterbitkan sebagai salah satu upaya mengantisipasi kebutuhan data guna pengukuran tingkat pembangunan di Kota Makassar. Publikasi ini berisi kumpulan indikator yang berkaitan dengan berbagai aspek kesejahteraan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar dan selanjutnya dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Disamping itu, gambaran tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pembangunan, yang dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan (rencana pembangunan pada masa yang akan datang)

## **1.3 Ruang Lingkup**

Aspek kesejahteraan disadari memiliki dimensi yang sangat luas, tidak terbatas hanya menyangkut aspek materi seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan perumahan,

---

melainkan juga aspek non materi seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan rasa aman. Karenanya guna melihat perkembangan taraf kesejahteraan masyarakat perlu adanya fokus perhatian pada suatu indikator sebagai petunjuk yang memberikan indikasi tentang perkembangan tersebut. Dengan memperhatikan fokus dan pembatasan masalah, yang dicakup dalam indikator kesejahteraan ini meliputi aspek-aspek kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan aspek sosial ekonomi lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Indikator menurut jenisnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: indikator masukan, indikator proses dan indikator keluaran/dampak. Dalam publikasi ini ketiga indikator tersebut disajikan dengan ukuran-ukuran seperti jumlah, proporsi, rasio dan angka/tingkat. Penyajian indikator sebagian besar merupakan agregasi pada tingkat Kota Makassar, sementara beberapa indikator yang disajikan pada tingkat kecamatan.

#### **1.4 Konsep dan Defenisi**

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan maka sebelum data tersebut dikumpulkan terlebih dahulu ditentukan batasan terhadap keterangan yang akan dikumpulkan dan batasan tersebut diusahakan baku dan berlaku umum untuk para pemakai data.

**Adapun konsep dan defenisi tersebut adalah :**

##### ***Rumah Tangga Biasa***

Adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.

---

**Rumah Tangga Khusus**

Adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan sekelompok orang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih. Rumah tangga khusus ini tidak dicakup dalam Susenas.

**Kepadatan penduduk**

Rata-rata banyaknya penduduk perkilometer persegi

**Rasio Jenis Kelamin**

Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan dikali 100.

**Kawin**

Kawin adalah mempunyai istri/suami pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum, tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

**Cerai Hidup**

Adalah berpisah sebagai suami/istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ke tempat lain karena mencari pekerjaan.

**Cerai Mati**

Adalah ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

**Metode Kontrasepsi**

Adalah alat/cara pencegah kehamilan.

**Sekolah**

Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal mulai dari pendidikan sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.

---

***Tidak atau Belum Pernah Sekolah***

Adalah tidak atau belum pernah sekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat. Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

***Masih Bersekolah***

Adalah sedang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi.

***Tidak Sekolah lagi***

Adalah pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.

***Melek Huruf***

Adalah penduduk 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

***Angka partisipasi Sekolah***

Adalah ukuran yang menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut batasan usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

***Keluhan Kesehatan***

Adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

***Bekerja***

Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus selama seminggu yang lalu. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.

---

**Menganggur**

Adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran termasuk mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, telah diterima bekerja tetapi belum bekerja dan yang di PHK tetapi masih berhasrat untuk bekerja.

**Penduduk Usia Kerja**

Adalah penduduk yang berusia 10 tahun keatas.

**Angkatan Kerja**

Adalah penduduk usia 10 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan.

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan tersebut (angkatan kerja) dibandingkan dengan penduduk usia 10 tahun keatas.

$$TPAK = \frac{AK}{P_{10+}} \times 100$$

Keterangan :

AK = Angkatan Kerja

P10+= Penduduk usia 10 tahun ketas

**Tingkat Pengangguran Terbuka**

Perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja.

$$TPT = \frac{TM}{AK} \times 100\%$$

---

*Keterangan :*

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

TM = Jumlah Penduduk yang mencari pekerjaan

AK = Jumlah Angkatan Kerja

### **Angka Beban Tanggungan**

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia non produktif (usia dibawah 15 tahun dan usia 65 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (antara usia 15 tahun sampai usia 64 tahun) dikali 100.

- **Penduduk Muda** adalah penduduk usia 0-14 tahun dibagi penduduk usia 15-64 tahun dikali 100.

- **Penduduk Tua** adalah penduduk usia 65 tahun keatas dibagi penduduk usia 15-64 tahun dikali 100.

### **1.5. Sumber Data**

Publikasi ini disusun dengan sumber data utama berasal dari hasil survei yang dilaksanakan oleh BPS yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) ditambah beberapa data lain yang terkait. Susenas merupakan survei dengan cakupan data sosial yang paling luas, dan sangat potensial untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat. Data yang dicakup dalam Susenas antara lain bidang kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup, serta konsumsi rumah tangga.

Untuk itu, data Susenas sangat potensial untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat, ilustrasi mengenai keadaan berbagai komponen sosial dapat diketahui dengan menyusun data agregat berupa indikator seperti tingkat partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk, yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, persentase akseptor KB,

---

persentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga medis, persentase rumahtangga yang menggunakan sumber air bersih, menikmati listrik dan rata-rata pengeluaran sebulan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Indikator kesejahteraan rakyat Kota Makassar disusun dalam tujuh bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, sebagai pendahuluan yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup, konsep dan defenisi, sumber data dan sistematika penulisan.

Bab kedua, adalah tentang hal-hal kependudukan dan Keluarga Berencana, yaitu perkembangan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk, perkawinan dan rumahtangga, fertilitas dan keluarga berencana.

Bab ketiga, merupakan bab pembahasan mengenai kesehatan, yang meliputi sarana kesehatan, keluhan kesehatan, penolong persalinan, serta pemberian ASI.

Bab keempat, dibahas kondisi pendidikan yang mencakup sarana pendidikan, rasio murid-guru, rasio murid sekolah, angka partisipasi sekolah, kemampuan membaca dan menulis dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Bab kelima, digambarkan kondisi ketenagakerjaan yang mencakup penduduk menurut jenis kegiatan, partisipasi angkatan kerja dan pengangguran, lapangan usaha, jenis pekerjaan dan status pekerjaan.

Bab keenam, merupakan bab yang membahas tingkat sosial yang berkaitan dengan perumahan dan lingkungan hidup, kondisi fisik bangunan tempat tinggal, utilitas dan fasilitas tempat tinggal.

Bab ketujuh, merupakan bab terakhir yang memberikan gambaran yang menyangkut ekonomi rumahtangga yang mencakup pengeluaran rumahtangga menurut golongan pengeluaran.

---

## **BAB II KEPENDUDUKAN**

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena tidak saja menjadi sasaran tetapi juga menjadi pelaksana dari pembangunan. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan, perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan pembangunan.

Sementara itu, perluasan analisis khususnya bidang kependudukan akan terus berkembang seiring dengan makin majunya peradaban manusia. Oleh karena itu, tersedianya data kependudukan yang akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh para perencana pembangunan maupun pelaku bisnis.

Pemerintah sangat membutuhkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya, misalnya untuk merencanakan penyediaan sarana umum, perumahan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan tempat rekreasi. Sementara para pelaku bisnis memerlukan data penduduk untuk keperluan rencana produksi, pemasaran dan rekrutmen pekerja/karyawan. Dalam berbagai pihak, bagi lembaga swasta non profit data ini sangat dibutuhkan untuk bahan analisis suatu masalah tertentu.

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah penduduk yang mencakup antara lain jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Oleh sebab itu dalam bab ini akan disajikan tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk, penyebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk dan beban tanggungan, rasio jenis kelamin dan status perkawinan.

### **2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk**

Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2014 berdasarkan hasil proyeksi penduduk sebesar 1.429.242 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 706.814 jiwa dan perempuan 722.428 jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki dengan

perbandingan jenis kelamin (sex ratio) sebesar 97,84. Yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 jiwa penduduk laki-laki. Penduduk ini tersebar pada 14 kecamatan terdiri dari 143 kelurahan dengan total luas 175,77 km<sup>2</sup> sehingga kepadatan penduduk di Kota Makassar pada tahun 2014 sekitar 8.131 jiwa per km<sup>2</sup>. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2013 yang hanya mencapai 8.010 jiwa per km<sup>2</sup>.

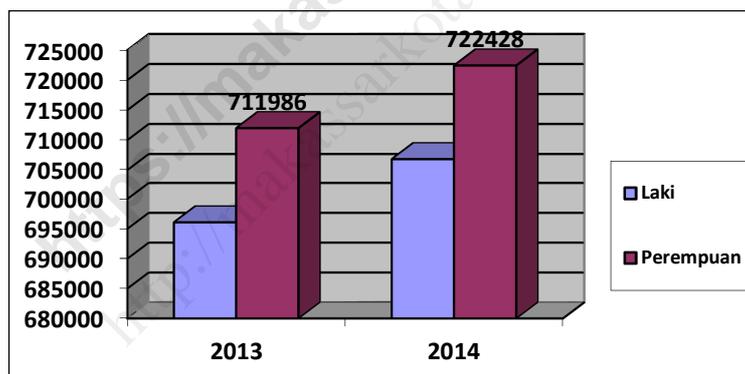
Tabel 2.1

Penduduk Kota Makassar Tahun 2013 dan 2014

Uraian	Tahun	
	2013	2014
1. Jumlah Penduduk	1.408.072	1.429.242
- Laki-laki	696.086	706.814
- Perempuan	711.986	722.428
2. Rasio Jenis Kelamin	97,77	97,84
3. Kepadatan penduduk	8.011	8.131

Grafik 1.

Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 dan 2014



---

## 2.2 Pertumbuhan Penduduk

Usaha untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk selalu menjurus kepada pengkajian bagaimana cara menurunkan tingkat fertilitas, sebab upaya ini merupakan salah satu komponen utama yang berpengaruh terhadap banyaknya penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar untuk periode 2013 dan 2014 sebesar 1,5 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk untuk provinsi Sulawesi Selatan, adalah sebesar 1,08. persen, lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lampiran 1.

Tabel 2.2  
Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar dan Sulawesi Selatan  
Tahun 2013 dan 2014

wilayah	2013	2014	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Makassar	1.408.072	1.429.242	1,5
Provinsi Sulawesi Selatan	8.342.047	8.432.163	1,08

Sumber : Makassar Dalam Angka 2015, BPS

## 2.3 Penyebaran dan Kepadatan Penduduk

Konsekuensi yang timbul dari permasalahan berkembangnya penduduk adalah bagaimana penyebarannya. Apakah terkonsentrasi pada suatu wilayah atau tersebar normal merata di seluruh wilayah. Ukuran sebaran dan kepadatan penduduk yang ideal sulit untuk ditentukan karena bergantung pada potensi yang dimiliki suatu wilayah serta kemampuan penduduk dalam memanfaatkan potensi yang ada. Umumnya konsentrasi penduduk yang tinggi akan sangat rawan

---

terhadap konflik sosial, selain itu juga menyulitkan pemerintah dalam penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya konsentrasi penduduk yang rendah akan menyebabkan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat menjadi relatif mudah

Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2014 tercatat 1.429.242 jiwa yang tersebar pada 14 kecamatan. Distribusi penduduk menurut kecamatan menunjukkan keadaan sebaran yang tidak merata.

Tabel 2.3 memperlihatkan bahwa perbedaan distribusi penduduk setiap kecamatan dengan persentase luas wilayah mengakibatkan kepadatan penduduk setiap kecamatan juga berbeda-beda. Secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kota Makassar yaitu sekitar 8.131 jiwa perkilometer. Kepadatan penduduk terendah sebesar 3.438 jiwa/km<sup>2</sup> di Kecamatan Tamalanrea, sedangkan kepadatan tertinggi mencapai 33.339 jiwa/km<sup>2</sup> di Kecamatan Makassar.

Terdapat empat kecamatan yang wilayahnya cukup luas, masing-masing di atas 10 persen dari luas wilayah Kota Makassar. Sementara terdapat enam kecamatan lainnya yang memiliki luas wilayah masing-masing kurang dari 2 persen. Empat wilayah kecamatan terluas di Kota Makassar berturut-turut adalah Biringkanaya 48,22 Km<sup>2</sup>, Tamalanrea 31,84 Km<sup>2</sup>, Manggala 24,14 Km<sup>2</sup> dan Tamalate 20,21 Km<sup>2</sup>.

Pada Tabel 2.3 terdapat distribusi sebaran penduduk menurut kecamatan. Distribusi penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Biringkanaya sekitar 13,35 persen, Tamalate 13,08 persen, Rappocini 11,23 persen, Panakkukang 10,22 persen.

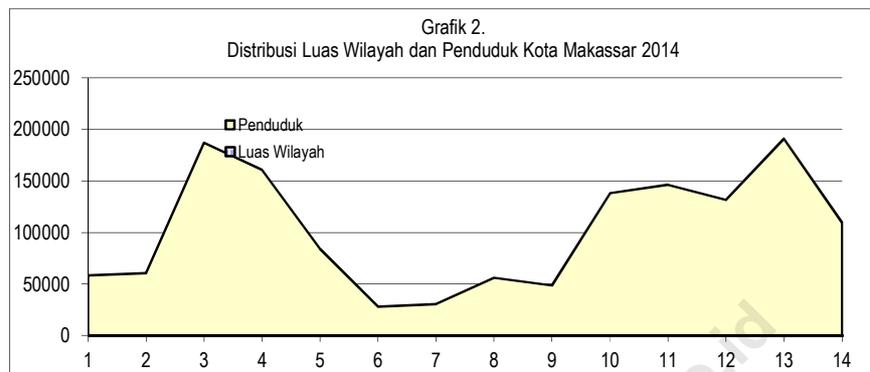
Karena pola distribusi penduduk dan luas wilayah antar kecamatan berbeda, maka tingkat kepadatan yang dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk terhadap luas wilayah, memiliki pola yang berbeda pula. Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa wilayah kota lama yang merupakan pusat niaga dan jasa memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi.

Tabel 2.3  
Distribusi dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan  
2014

Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	(%)	Penduduk	(%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Mariso	1,82	1,04	58.327	4,08	32.048
02. Mamajang	2,25	1,28	60.537	4,24	26.905
03. Tamalate	20,21	11,50	186.921	13,08	9.249
04. Rappocini	9,23	5,25	160.499	11,23	17.389
05. Makassar	2,52	1,43	84.014	5,88	33.339
06. Ujung Pandang	2,63	1,50	28.053	1,96	10.667
07. Wajo	1,99	1,13	30.505	2,13	15.329
08. Bontoala	2,10	1,19	55.937	3,91	26.637
09. Ujung Tanah	5,94	3,38	48.531	3,40	8.170
10. Tallo	5,83	3,32	137.997	9,66	23.670
11. Panakkukang	17,05	9,70	146.121	10,22	8.570
12. Manggala	24,14	13,73	131.500	9,20	5.447
13. Biringkaya	48,22	27,43	190.829	13,35	3.957
14. Tamalanrea	31,84	18,11	109.471	7,66	3.438
Jumlah	175,77	100,00	1.429.242	100,00	8.131

Sumber : Makassar Dalam Angka 2014, BPS

Untuk itu sangatlah logis apabila pengembangan wilayah pemukiman penduduk dapat diarahkan pada wilayah dengan tingkat kepadatan yang masih rendah, seperti pada kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea dan Manggala.



#### 2.4 Komposisi Penduduk dan Beban Tanggungan

Selain jumlah, pertumbuhan dan kepadatan penduduk, indikator lainnya yang perlu diketahui adalah komposisi penduduk, seperti komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Indikator ini menjadi penting sebagai petunjuk perkembangan taraf kesejahteraan karena kejadian demografis maupun karakteristiknya berbeda menurut umur dan jenis kelamin baik untuk kejadian kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk. Komposisi penduduk menurut umur dapat menggambarkan besarnya tingkat kelahiran yakni dengan melihat perubahan persentase penduduk usia muda. Indikator turunan lainnya yang dapat digambarkan dari komposisi kelompok umur adalah angka beban ketergantungan (ABK) yaitu perbandingan antara banyaknya penduduk umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas yang dianggap sebagai usia tidak produktif terhadap penduduk umur 15-64 tahun yang dianggap sebagai usia produktif.

Dengan mengetahui struktur umur penduduk, kita dapat mengukur besarnya *dependency ratio* (Angka Beban Ketergantungan), yang selanjutnya disebut "beban ketergantungan". Beban ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang secara ekonomis tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun) dengan jumlah penduduk yang secara ekonomis dianggap

produktif (usia 15-64 tahun). Sehingga semakin kecil porsi penduduk yang berusia non produktif, maka semakin kecil pula angka beban ketergantungan itu dan sebaliknya semakin besar porsi penduduk berusia non produktif, maka semakin besar pula angka beban ketergantungan tersebut.

Dari tabel 2.4 di bawah ini memperlihatkan beban ketergantungan penduduk Kota Makassar pada tahun 2013 sebesar 48,10 dan turun menjadi 42.57 pada tahun 2014. Angka tersebut pada tahun 2014 memberikan gambaran bahwa setiap 100 penduduk produktif di Kota Makassar harus menanggung secara ekonomis sekitar 42 penduduk usia tidak produktif. Turunnya angka beban ketergantungan pada tahun 2014 disebabkan meningkatnya penduduk usia produktif 15-64 tahun dan menurunnya jumlah penduduk berusia 0-4 th.

Tabel 2.4  
Angka Beban Ketergantungan Kota Makassar Tahun 2013 - 2014

Angka Beban Ketergantungan	2013			2014		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penduduk Muda (0-14 thn /15-64 thn)	44.75	41.39	43.04	39.03	36.09	37.54
Penduduk Tua (65+ /15-64 thn)	4.34	5.75	5.06	4.21	5.82	5.03
Total	49.09	47.14	48.10	43.24	41.91	42.57

Sumber : Makassar Dalam Angka 2014, BPS

Jika usia tidak produktif dibedakan antara usia muda (0-14 tahun) dan usia tua (usia 65+), maka angka beban tanggungan dibedakan menjadi angka beban tanggungan penduduk muda dan angka beban tanggungan penduduk tua. Dalam kurun 2013-2014 angka beban tanggungan penduduk muda dan penduduk tua mengalami penurunan. Angka beban tanggungan penduduk muda turun sebesar 5,5 dan dan angka beban tanggungan penduduk tua turun sebesar 0,03.

Namun demikian penduduk muda masih dominan sebagai beban tanggungan penduduk usia produktif, karena angka beban tanggungan penduduk tua relatif kecil, yaitu 5,03 pada tahun 2014 dan pada tahun 2013 hanya sekitar 5,06.

## 2.5 Sex Ratio

Sex Ratio (ratio jenis kelamin) penduduk Kota Makassar pada tahun 2014 sebesar 97,84, artinya di Kota Makassar terdapat 97 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa pada kelompok umur 0-4 tahun dan kelompok umur 5-14 tahun sex rasionya di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Sebaliknya pada kelompok umur/usia sedang (15-64) dan kelompok penduduk tua (65+) sex rasionya dibawah 100, yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

Tabel 2.5  
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut  
Kelompok Umur di Kota Makassar 2013-2014

Kelompok Umur	2013			2014		
	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 - 4	63.457	61.209	103,67	70.363	67.081	104,89
5 - 14	145.474	139.080	104,60	122.227	116.643	104,79
15 - 64	466.876	483.861	96,49	493.470	509.070	96,94
65 +	20.279	27.836	72,85	20.754	29.634	70,03
Total	676.744	692.862	97,67	706.814	722.428	97,84

Sumber : Makassar Dalam Angka 2014, BPS

---

Pola yang terbentuk dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin penduduk usia dewasa lebih rendah dari penduduk usia muda. Atau dengan kata lain, pada kelompok usia muda jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Sedangkan pada kelompok usia dewasa, jumlah laki-lakinya lebih sedikit dibanding jumlah perempuan. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat migrasi dan rendahnya tingkat harapan hidup penduduk laki-laki dibanding perempuan.

## **2.6 Status Perkawinan**

Perkawinan merupakan awal terbentuknya suatu keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok masyarakat terkecil yang biasanya terdiri dari suami istri dan anak dan ditandai dengan adanya hubungan darah. Namun karena suatu hal, adakalanya keluarga dapat hanya terdiri dari suami-isteri bagi keluarga yang baru terbentuk, ibu dan anak, atau ayah dan anak. Status perkawinan dibedakan menjadi empat kelompok, yakni belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Perkembangan atau perubahan status perkawinan dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan, kaitannya dengan tingkat kelahiran dan hubungan sosial. Umumnya, suatu daerah dengan proporsi kawin yang tinggi cenderung memiliki jumlah kelahiran yang tinggi. Kemudian tingginya proporsi penduduk berstatus cerai hidup merupakan gambaran tingginya tingkat perceraian.

Penduduk menurut status perkawinan dapat dibedakan menurut dua kelompok yaitu belum kawin dan pernah kawin. Pernah kawin meliputi mereka yang kawin, cerai hidup dan cerai mati.

Pengertian kawin yang dicakup dalam survei ini adalah penduduk yang terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin secara sah/resmi tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekitar dianggap sebagai suami istri.

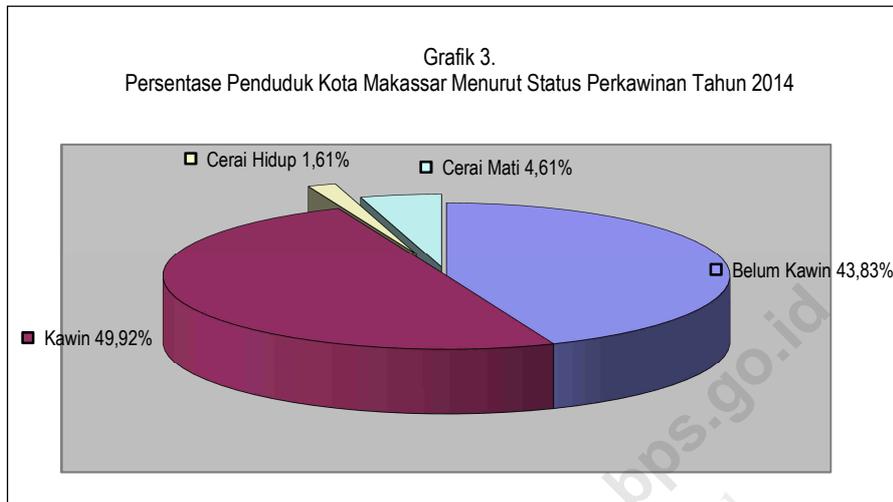
Pada Tabel 2.6 ditampilkan persentase penduduk menurut status perkawinan penduduk Kota Makassar usia 10 tahun ke atas tahun 2013 dan 2014. Nampak bahwa proporsi penduduk berstatus kawin mengalami peningkatan sebesar 0,32 persen selama tahun 2013-2014, yaitu dari 49,60 persen menjadi 49,92 persen. Persentase status perkawinan cerai hidup mengalami penurunan sebesar 0,12 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki yang berstatus kawin mengalami penurunan sebesar 1,00 persen, sedangkan penduduk perempuan mengalami sebesar 1,56 persen. Selama tahun 2013-2014, angka perceraian di Kota Makassar mengalami penurunan sebesar 0,12 persen.

Tabel 2.6  
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan  
Kota Makassar 2013-2014

Status Perkawinan (1)	2013			2014		
	L (2)	P (3)	L+P (4)	L (5)	P (6)	L+P (7)
Belum Kawin	46.17	42.70	44.38	46,74	41,03	43,83
Kawin	51.91	47.42	49.60	50,91	48,98	49,92
Cerai Hidup	0.88	2.53	1.73	0,82	2,38	1,61
Cerai Mati	1.04	7.35	4.29	1,53	7,62	4,61

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013-2014



## 2.7 Formasi Keluarga

Keluarga yang dimaksud dalam publikasi ini adalah rumahtangga. Dalam suatu rumahtangga biasanya dikepalai oleh seorang kepala rumahtangga, yaitu orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari dalam rumahtangga tersebut, atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumahtangga. Selain kepala rumahtangga, terdapat pula anggota rumahtangga lain menurut hubungan dengan kepala rumahtangga seperti istri/suami, anak kandung, anak tiri/adopsi, menantu, cucu, orang tua, mertua, famili lain, pembantu rumahtangga, sopir, tukang kebun dan anggota rumah tangga lainnya artinya mereka yang tidak ada hubungan family dengan kepala rumahtangga atau dengan istri/suami kepala rumahtangga, misalnya mantan menantu atau anak kost.

Tabel 2.7  
 Persentase Status Hubungan dengan Kepala Rumahtangga Penduduk Kota Makassar  
 2013 - 2014

Hubungan dengan Kepala Rumahtangga	2013			2014		
	L	P	L+ P	L	P	L+ P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepala Rumahtangga	37,51	8,63	22,90	38,03	9,58	23,65
Isteri/Suami	0,05	32,00	16,20	0,14	32,42	16,47
Anak	47,24	44,40	45,80	46,21	43,04	44,61
Menantu	3,00	2,41	2,70	2,86	2,57	2,71
Cucu	5,14	4,42	4,78	5,99	4,23	5,10
Orangtua/Mertua	0,62	1,99	1,32	0,26	1,75	1,01
Famili lain /Pembantu/ Lainnya	6,44	6,15	6,29	6,51	6,41	6,45

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013-2014

Pada tabel 2.7 nampak bahwa semua laki-laki yang berstatus sebagai suami menjadi kepala rumahtangga. Sedangkan dari seluruh perempuan di Kota Makassar tahun 2014 yang berperan sebagai kepala rumahtangga sekitar 9,58 persen. Secara keseluruhan penduduk di Kota Makassar yang berperan sebagai kepala rumahtangga yaitu sekitar 23,65 persen dan anak sekitar 44,61 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari setiap kepala rumahtangga menanggung sekitar 2 anak.

---

Peningkatan proporsi laki-laki sebagai kepala rumahtangga merupakan indikasi semakin banyaknya keluarga baru yang terbentuk selama kurun waktu 2013-2014. Sedangkan peningkatan proporsi perempuan sebagai kepala rumahtangga diduga bertalian erat dengan meningkatnya status cerai penduduk perempuan.

Dari komposisi penduduk menurut hubungan dengan kepala rumahtangga, nampak bahwa masyarakat Kota Makassar masih banyak yang menganut sistim keluarga luar (*extended family*). Artinya rumahtangga yang dibangun memiliki lebih dari satu keluarga inti, atau terdiri 2 sampai 3 keluarga dalam satu rumahtangga.

---

### **BAB. III FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA**

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk adalah dengan cara menekan tingkat fertilitas, yaitu melalui pembatasan dan penjarangan kelahiran. Proses ini dilaksanakan dengan cara mengajak masyarakat, khususnya pasangan usia subur untuk ikut berperan aktif dalam gerakan keluarga berencana. Gerakan ini bukan sekedar untuk menekan laju pertumbuhan penduduk tetapi lebih dari itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Himbauan untuk menunda usia perkawinan pertama dan membatasi jumlah kelahiran merupakan usaha nyata dalam merealisasikan tujuan tersebut.

#### **3.1 Usia Perkawinan Pertama**

Usia perkawinan pertama merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat fertilitas, karena semakin tinggi umur perkawinan, khususnya wanita menyebabkan masa reproduksinya lebih pendek. Hal ini berarti pula bahwa penundaan perkawinan mengakibatkan berkurangnya peluang wanita untuk melahirkan anak lebih banyak.

Perkawinan yang dilakukan pada usia matang (lebih dari 20 tahun) bagi perempuan akan membantu mereka menjadi lebih siap untuk menjadi ibu dan mengurangi resiko persalinan. Sementara persalinan yang dilakukan pada ibu usia kurang dari 20 tahun, lebih dari 35 tahun, pernah hamil empat kali/lebih, atau jarak waktu kelahiran terakhir kurang dari dua tahun akan semakin memperbesar resiko persalinan.

Tabel 3.1  
Jumlah dan Persentase Wanita Usia 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Saat Perkawinan Pertama Kota Makassar Tahun 2014

Tahun	Umur Perkawinan Pertama			
	<= 15 tahun (%)	16-18 tahun(%)	19-24 tahun (%)	25 + tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	6,40	20,54	49,35	23,70
2014	9,62	21,77	43,73	24,88

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013 - 2014

Tabel 3.1 memperlihatkan bahwa sebagian besar wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin menikah pertama di usia antara 19-24 tahun yaitu sebesar 43,73 persen, kemudian sebesar 24,88 persen menikah pada usia 25 tahun ke atas. Di Kota Makassar masih ada wanita yang menikah di usia 15 tahun ke bawah, yaitu sebesar 9,62 persen, angka ini mengalami peningkatan sebesar 3,22 persen dari tahun sebelumnya.

Fenomena patut menjadi perhatian yang serius mengingat masih banyaknya masyarakat yang menikahkan anak gadisnya dibawah 17 tahun. Faktor budaya yang tercermin dari sikap sebahagian orangtua yang merasa takut anaknya menjadi perawan tua, pemahaman yang masih rendah tentang lembaga perkawinan, juga adanya globalisasi yang menyebabkan akses dunia hiburan yang tak terkontrol dan faktor pergaulan yang bebas merupakan faktor penyebab masih banyaknya penduduk yang menikah pada usia dini.

### 3.2 Jumlah Anak Yang Dilahirkan Hidup

Fertilitas merupakan komponen demografi yang bersifat menambah jumlah penduduk secara alami. Karena berhubungan langsung dengan kemampuan seseorang melahirkan anak. Jika tingkat

---

fertilitas tidak bisa dikendalikan maka ledakan jumlah penduduk akan terjadi yang pada gilirannya hal ini akan menimbulkan berbagai masalah kependudukan.

Tingkat fertilitas ditunjukkan oleh data jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh wanita pernah kawin.

Tabel 3.2  
Persentase Wanita Usia 10 tahun Keatas yang Pernah Kawin  
Menurut Jumlah Anak Lahir Hidup di Kota Makassar 2013 - 2014

Jumlah Anak Lahir Hidup (1)	2013	2014
	Persen (2)	Persen (5)
0	7,52	7,48
1	15,67	18,70
2	27,37	24,46
3	16,67	19,43
4	14,86	13,68
5+	17,91	16,26

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013 - 2014

Jika dilihat dari jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita pernah kawin, Nampak bahwa jumlah anak yang dilahirkan sebagian besar wanita pernah kawin di tahun 2014 adalah 2 orang anak dengan persentase sebesar 24,46 persen. Jumlah anak 5 atau lebih yang dilahirkan oleh wanita pernah kawin pada tahun 2014 ini masih cukup tinggi, yaitu sebesar 16,26 persen.

### 3.3 Pemakaian Alat/Cara KB

Selain melalui penundaan usia perkawinan pertama, partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah menangani masalah kependudukan adalah berupa kesadaran masyarakat untuk

mensukseskan Keluarga Berencana. Salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Hal ini bisa ditempuh antara lain dengan cara pemakaian alat/cara kontrasepsi KB.

Indikasi makin meningkatnya partisipasi masyarakat pada gerakan keluarga berencana untuk membatasi atau menjarangkan kelahiran salah satunya dengan program KB yang bertujuan selain menurunkan tingkat fertilitas, juga untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rumahtangga.

Tabel 3.3 menyajikan keikutsertaan wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Selama kurun waktu 2013-2014, persentase penduduk yang sedang ikut menggunakan alat/cara KB mengalami kenaikan sekitar 4,27 persen yakni dari 46,27 persen di tahun 2013 menjadi 50,51 persen di tahun 2014.

Tabel 3.3  
Jumlah dan Persentase Wanita Berumur 15- 49 Tahun yang Menikah Menurut Penggunaan Kontrasepsi di Kota Makassar, 2013 - 2014

Tahun	Pengguna/Memakai alat/Cara KB		
	Sedang Menggunakan	Tidak Menggunakan Lagi	Tidak Pernah Menggunakan
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	46,27	22,75	30,98
2014	50,51	15,27	34,23

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013-2014

Tabel 3.4 menyajikan persentase wanita umur 15-49 tahun yang bestatus kawin menurut jenis alat/cara KB yang sedang digunakan. Pemakaian jenis kontrasepsi seperti MOW/MOP, AKDR/IUD, suntik KB, susuk KB, dan alat kontrasepsi lainnya terlihat mengalami peningkatan pemakaian

alat/cara KB tahun 2014, sedangkan penggunaan jenis kontrasepsi yang mengalami penurunan adalah Pil KB sebesar 3,54 persen. Namun penggunaan alat kontrasepsi yang paling digemari oleh sebagian besar wanita yang berstatus kawin adalah KB suntik mencapai 68,89 persen, diikuti oleh KB Pil sebesar 13,40 persen, dan KB AKDR/IUD sebesar 10,07 persen.

Banyaknya akseptor yang menggunakan suntikan KB bisa disebabkan karena alat/cara ini relatif lebih praktis dan mudah dilakukan begitu juga dalam hal pemberhentian bisa dilakukan pada saat yang dikehendaki oleh akseptor. Sedangkan untuk penggunaan pil KB, hal ini sejalan dengan pemahaman masyarakat bahwa jenis kontrasepsi Pil KB pada dasarnya memiliki tingkat efektifitas tinggi untuk mencegah kehamilan, akan tetapi dalam pemakaiannya karena faktor kesalahan manusia yang sering terjadi lupa minum pil KB.

Tabel 3.4  
 Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun yang Kawin Menurut Jenis Alat kontrasepsi yang digunakan Di Kota Makassar 2013 - 2014

Jenis Kontrasepsi	2013 (%)	2014 (%)
(1)	(5)	(3)
MOW/MOP	0,74	1,17
AKDR/IUD	10,03	10,07
Suntikan	66,57	68,89
Susuk	3,87	4,04
Pil	16,94	13,40
Lainnya	1,85	2,43

Sumber : BPS Kota Makassar ,Susenas 2013-2014

---

## **BAB IV KESEHATAN**

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata, dengan harapan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Upaya perbaikan taraf kesehatan masyarakat dapat ditempuh melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang berkesinambungan baik dari segi mutu maupun jumlahnya, seperti rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga medis lainnya. Pelayanan kesehatan diharapkan semakin baik dengan fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dengan mudah, murah dan merata.

Menurut perencanaan program dan dampaknya, indikator kesehatan terdiri dari indikator upaya perbaikan kesehatan dan status kesehatan, serta indikator penunjang. Indikator kesehatan tersebut yang dapat diturunkan dari data Susenas diantaranya adalah persentase persalinan ditolong tenaga medis, persentase bayi/balita diberi ASI, persentase keluhan kesehatan, dan jumlah hari sakit.

### **4.1 Status Kesehatan Masyarakat**

Status kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat terutama dalam upaya preventatif. Pola hidup tersebut juga sangat tergantung pada perilaku dan pendapatan masyarakat. Pola hidup mengalami perubahan jika pendapatan cenderung tetap atau mengalami penurunan, di sisi lain pemenuhan kebutuhan semakin sulit dengan kenaikan harga secara terus menerus. Sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan terjadinya pergeseran pola makan yang secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kesehatan.

---

## 4.2 Keluhan Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan dimana seseorang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan dan hal lain, termasuk juga mereka yang menderita penyakit kronis dan belum sembuh. Tabel 4.1 dari data Hasil Susenas 2014 menunjukkan bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hanya sebesar 13,93 persen, dan mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2013 yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 18,24 persen, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan.

Tabel 4.1  
Persentase Penduduk Kota Makassar yang Mengalami Keluhan Kesehatan  
2013 - 2014

Tahun	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Laki-laki + Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	18,79	17,72	18,24
2014	13,82	14,03	13,93

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013 - 2014

### 4.2 Lama Hari Sakit

Lama hari sakit dihitung menurut lama mengalami keluhan kesehatan yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Sedangkan Jumlah hari sakit menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang dialami penduduk. Selain itu juga mencerminkan besarnya kerugian yang dialami penduduk karena penyakit yang diderita.

Jumlah hari sakit menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang dialami penduduk. Selain itu juga mencerminkan besarnya kerugian yang dialami penduduk karena penyakit yang diderita

semakin banyak jumlah hari sakit semakin tinggi tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk dan semakin besar kerugian yang dialami.

Hasil Susenas 2014 di Kota Makassar menunjukkan bahwa dari semua penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang paling banyak adalah mereka yang mengalami keluhan kurang dari 4 hari yaitu sekitar 58,16 persen. Jumlah hari sakit 4-7 hari sekitar 34,80 persen, 8-14 hari sekitar 1,70 persen, 15-21 hari sakit sebesar 0,92 persen, sedangkan yang mengalami keluhan kesehatan lebih setengah bulan sekitar 4,42 persen. Jumlah ini meningkat 0,6 persen dibanding tahun 2013 (Lihat tabel 4.2).

Tabel 4.2  
Persentase Penduduk Penderita Sakit menurut Jumlah Hari Sakit  
Kota Makassar, 2013 – 2014

Jumlah Hari Sakit	2013			2014		
	L	P	L+ P	L	P	L+ P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< 4	71,56	62,29	67,06	62,93	53,92	58,16
4 – 7	22,35	31,66	26,87	33,08	36,34	34,80
8 - 14	2,41	0,88	1,67	0,83	2,74	1,70
15 – 21	0,00	1,19	0,58	0,00	1,74	0,92
22 - 30	3,68	3,98	3,82	3,17	5,52	4,42

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013 - 2014

---

### 4.3 Penolong Persalinan

Penolong persalinan berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan bayi dan ibu pada saat proses persalinan. Pemilihan penolong persalinan yang berkualitas tentunya lebih memungkinkan terwujudnya keselamatan/kesehatan bayi dan ibu pada saat persalinan. Tenaga medis sebagai penolong persalinan diyakini lebih baik dibandingkan tenaga non medis.

Penolong persalinan dapat dijadikan indikator bidang kesehatan terutama dalam kaitannya dengan kesehatan ibu dan anak serta mutu pelayanan kesehatan secara umum. Tempat persalinan yang khusus disertai dengan peralatan yang baik dan ditolong oleh petugas yang terampil, diperkirakan akan lebih baik bila dibandingkan dengan tempat bersalin di rumah, dengan peralatan sederhana dan ditolong oleh tenaga non medis.

Tabel 4.3  
Jumlah Balita Penolong Persalinan Terakhir Menurut Jenis Profesi  
Kota Makassar 2013 - 2014

Tahun	Penolong persalinan Terakhir					
	Dokter	Bidan	Paramedis	Dukun	Keluarga	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
2013	40,04	54,99	0,46	3,69	0,83	0,00
2014	47,98	47,71	0,54	2,88	0,28	0,61

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013 - 2014

Penolong persalinan di Kota Makassar selama kurun waktu 2013 - 2014 dengan pemanfaatan tenaga dokter sebagai penolong persalinan mengalami peningkatan menjadi 47,98 persen pada tahun 2014 dibanding tahun 2013, sedangkan pemanfaatan tenaga bidan mengalami penurunan

---

dari 54,99 persen menjadi 47,71 persen. Dari Tabel 4.3 juga terlihat bahwa masih ada masyarakat yang memanfaatkan dukun sebagai penolong kelahiran. Hal ini perlu dikaji lebih dalam guna mendapat faktor-faktor penyebabnya, apakah karena akses ke tenaga medis masih sulit atau faktor biaya persalinan yang mahal.

#### **4.4 Pemberian Air Susu Ibu (ASI)**

Sekarang ini pemerintah senantiasa mengaktualisasikan dan mensosialisasikan peningkatan pemanfaatan air susu ibu (ASI) bagi balita. Hal ini karena dalam pertumbuhan dan perkembangan balita sangat memerlukan air susu ibu (ASI), karena ASI merupakan zat makanan yang paling ideal untuk pertumbuhan bayi sebab selain bergizi juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh. Pemberian ASI kepada bayi akan memenuhi kebutuhan gizi dan memberikan kekebalan terhadap beberapa penyakit.

Pemberian ASI merupakan indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesadaran ibu terhadap kesehatan anak. Tabel 4.4 memperlihatkan persentase anak usia 2-4 tahun yang pernah disusui menurut lamanya disusui di Kota Makassar.

Jika dilihat dari lamanya disusui pada balita (Tabel 4.4), nampak selama kurun 2013 – 2014 persentase anak Usia 2- 4 tahun yang pernah disusui masih cukup tinggi yaitu sebesar 89,27 persen. Ini berarti menunjukkan adanya kesadaran penduduk akan pentingnya ASI bagi bayi.

Di Kota Makassar tahun 2014, persentase anak usia 2-4 tahun yang pernah disusui menurut lama disusui antara umur 1-5 bulan yaitu sekitar 16,17 persen, kemudian lamanya disusui umur 6-11 bulan sekitar 16,91 persen, lama disusui 12-17 bulan sekitar 30,80 persen, lama disusui 18-23 bulan sekitar 7,80 persen dan lamanya disusui 2 tahun lebih terdapat sekitar 17,59 persen balita. Ini berarti bahwa kesadaran ibu akan arti pentingnya ASI bagi bayi sudah relative baik, karena pemberian ASI kepada bayi lebih efisien jika dilihat dari segi ekonomi, sebab ASI jauh lebih murah

jika dibandingkan dengan susu formula. Akan tetapi, bagi ibu yang tetap memberikan ASI pada bayinya, mungkin hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya.

Tabel 4.4  
Persentase Anak Usia 2- 4 tahun yang pernah Disusui Menurut Lama Disusui  
Kota Makassar 2013 - 2014

Lama Disusui (Bulan)	2013			2014		
	L (%)	P (%)	L+ P (%)	L (%)	P (%)	L+ P (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
0				12,11	9,32	10,73
1-5	12.09	9.45	10.72	10,97	21,50	16,17
6-11	5.87	15.67	10.96	15,56	18,30	16,91
12-17	43.44	25.75	34.25	34,52	26,98	30,80
18-23	8.93	16.67	12.95	7,67	7,94	7,80
24+	29.67	32.46	31.12	19,17	15,97	17,59

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013 - 2014

#### 4.5 Sarana Kesehatan

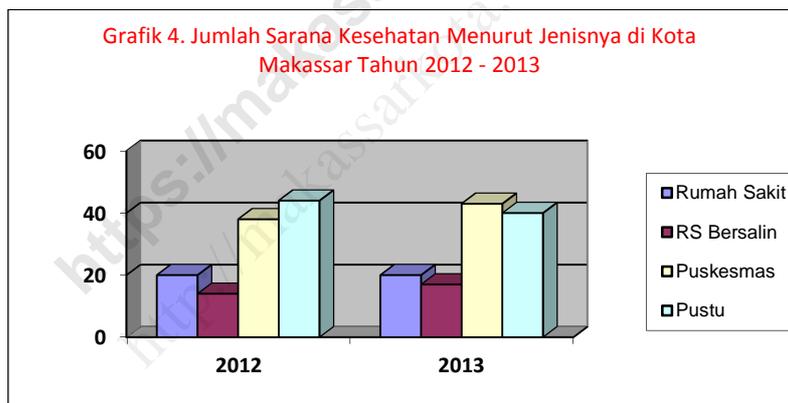
Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah penyediaan sarana kesehatan yang memadai. Dengan semakin meningkatnya sarana tersebut maka setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mendapat pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Puskesmas adalah satu unit pelayanan fungsional yang fungsi utamanya adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan atau sebagian dari kecamatan yang biasanya dibangun dengan melihat kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografi dan infrastruktur lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya tidak semua puskesmas dapat menjangkau semua penduduk yang dibebankan dalam wilayahnya, oleh sebab itu harus ditunjang dengan fasilitas layanan kesehatan lainnya. Fasilitas layanan

kesehatan lainnya yang dimaksud adalah Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu. Keberadaan kedua fasilitas ini sangat membantu puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Selain pengadaan fasilitas kesehatan, juga perlu ditunjang dengan kualitas pelayanan. Untuk itu keberadaan tenaga kesehatan yang berkualitas sangat diperlukan. Kualitas tenaga kesehatan sangat ditentukan oleh spesifikasi pendidikan yang dimiliki yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang akan diberikan pada masyarakat.

Tabel 4.5  
Banyaknya Sarana Kesehatan menurut Jenisnya di Kota Makassar 2013 - 2014

Sarana Kesehatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
1. Rumah Sakit	20	
2. RS. Bersalin/RSIA	17	
3. Puskesmas	43	
4. Puskesmas Pembantu	40	
Jumlah		

Sumber : Dinkes Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2014)



---

## **BAB V PENDIDIKAN**

Sumber daya manusia sangat penting peranannya dalam proses pembangunan. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan bermuara pada pembangunan manusia. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Program pendidikan mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan sosial ekonomi bangsa. Pembangunan pendidikan pada dasarnya dilakukan dalam empat strategi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan.

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah, penambahan tenaga pengajar. Relevansi pendidikan melalui konsep “link and match”, yaitu relevansi strategi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Pendidikan hendaknya menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai tuntutan zaman. Dan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan supaya pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan keadaan bidang pendidikan secara umum di Kota Makassar diantaranya adalah kemampuan membaca dan menulis, partisipasi sekolah, pendidikan yang ditamatkan, dan ketersediaan sarana pendidikan.

### **5.1 Sarana Pendidikan**

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan penting untuk terus diupayakan sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk dan diberlakukannya program wajib belajar 9 tahun. Upaya ini ditujukan agar pelayanan pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan menuju standar yang diharapkan. Ketersediaan sarana pendidikan yang paling

---

dasar dapat ditunjukkan melalui indikator rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah. Meski memiliki kelemahan, yakni indikator bersifat kuantitatif bukan kualitatif, perubahan yang terjadi dalam indikator ini diharapkan dapat memberikan gambaran kemajuan pembangunan sarana pendidikan.

## 5.2 Rasio Murid Guru

Rasio murid Guru (RMG) merupakan perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Rasio murid guru menggambarkan rata-rata banyaknya murid yang diajar oleh seorang guru. Kelihatannya ada kecenderungan makin sedikit murid yang ditangani seorang guru semakin baik proses belajar mengajar. Hal ini karena guru dengan mudah memantau murid yang diajar dalam kelas, juga mudah mengukur prestasi belajar setiap siswa. Meskipun demikian, belum ada patokan tentang rasio murid guru yang ideal dalam proses belajar mengajar.

Tabel 5.1

Rasio Murid Guru di Kota Makassar Tahun Ajaran 2011/2012, 2012/2013 dan 2013/2014

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid- Guru		
	2011/2012	2012/2013	2013/2014
(1)	(2)	(3)	(4)
S D/Sederajat	23	22	22
S M P/ederajat	15	15	16
S M A/Sederajat	11	9	11

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar (Makassar dalam Angka 2013)

Tabel 5.1 secara umum RMG menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas sudah semakin baik. Rasio murid guru pada jenjang pendidikan SD/ sederajat pada tahun ajaran 2013/2014 yaitu 22 yang menunjukkan bahwa setiap guru mengajar sekitar 22 murid. Selanjutnya RMG pada jenjang pendidikan SMP /sederajat sekitar 16 atau terdapat sekitar 16 murid diajar oleh seorang guru. Sementara itu, RMG pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat sekitar 11 atau terdapat sekitar 11 murid diajar oleh seorang guru.

---

### 5.3 Rasio Murid Sekolah

Rasio murid sekolah (RMS) pada setiap jenjang pendidikan diperoleh dengan membandingkan jumlah murid dengan jumlah sekolah. Rasio murid sekolah menggambarkan rata-rata banyaknya murid pada setiap sekolah dalam setiap jenjang pendidikan. Rasio ini diperlukan untuk mengetahui kepadatan murid pada setiap sekolah yang salah satu kegunaannya adalah untuk melihat layak tidaknya menambah gedung sekolah di suatu wilayah.

Rasio murid sekolah (RMS) untuk semua jenjang pendidikan sekolah di Kota Makassar pada tahun ajaran 2013/2014 menunjukkan angka yang tinggi dibanding tahun ajaran sebelumnya. Pada tahun ajaran 2013/2014 RMS pada jenjang SD/ sederajat sebanyak 305 murid per sekolah kemudian untuk jenjang SMP/ sederajat sebanyak 327 murid per sekolah dan untuk rasio murid sekolah pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat SMA/ sederajat sebanyak 467 murid/ siswa setiap sekolah.

Besarnya rasio murid sekolah pada setiap jenjang pendidikan sekolah menunjukkan adanya indikasi semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini tentunya sangat beralasan sekali karena hampir seluruh aspek kehidupan memerlukan pendidikan yang memadai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2  
Rasio Murid Sekolah di Kota Makassar Tahun Ajaran 2011/2012, 2012/2013 dan 2013/2014

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid- Sekolah		
	2011/2012	2012/2013	2013/2014
(1)	(2)	(3)	(4)
S D/ Sederajat	329	319	305
S M P/ Sederajat	350	325	327
S M A/ Sederajat	445	446	467

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2013)

Telaah lebih lanjut di tingkat kecamatan, nampak adanya variasi yang relatif besar pada rasio murid sekolah. Rentang rasio murid sekolah tingkat SD berada pada kisaran terendah 257 di Kecamatan Wajo dan Bontoala hingga tertinggi 377 di kecamatan Biringkanaya. Sedangkan pada tingkat SMP, rasio murid sekolah terendah 145 di kecamatan Wajo dan tertinggi 537 di kecamatan Tamalate. Pada tingkat SMA, rasio murid sekolah terendah 270 di kecamatan Bontoala dan tertinggi 621 di kecamatan Biringkanaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 5.3 dan 5.4

Tabel 5.3  
Rasio Murid Sekolah dan Rasio Murid Guru Menurut Kecamatan  
di Kota Makassar 2013/2014

Kecamatan	SD		SMP		SMA	
	Rasio Murid Sekolah	Rasio Murid Guru	Rasio Murid Sekolah	Rasio Murid Guru	Rasio Murid Sekolah	Rasio Murid Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Mariso	258	21	462	28	524	12
02. Mamajang	346	25	436	17	454	16
03. Tamalate	269	21	537	17	571	9
04. Rappocini	300	19	260	11	388	7
05. Makassar	307	23	154	11	331	12
06. Ujung Pandang	344	22	411	27	591	15
07. Wajo	257	21	145	8	317	9
08. Bontoala	257	20	167	17	270	5
09. Ujung Tanah	286	27	268	15	432	25
10. Tallo	306	26	342	14	351	8
11. Panakkukang	274	18	281	17	498	12
12. Manggala	318	23	335	15	489	20
13. Biringkaya	377	24	486	15	621	10
14. Tamalanrea	315	26	286	16	551	13
Jumlah	305	22	327	16	467	11

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2013)

Tabel 5.4  
Jumlah Murid, Guru dan Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2013

Kecamatan	SD			SMP			SMA		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01. Mariso	22	5667	264	7	3231	114	5	2621	214
02. Mamajang	28	9701	391	10	4364	253	11	4992	320
03. Tamalate	47	12645	592	13	6982	419	10	5712	626
04. Rappocini	49	14712	793	8	4683	414	13	5043	681
05. Makassar	38	11648	516	17	2610	241	10	3308	270
06. Ujung Pandang	31	10679	491	17	6987	258	9	5320	346
07. Wajo	15	3855	188	8	1161	138	5	1587	185
08. Bontoala	24	6162	305	11	1833	105	6	1618	327
09. Ujung Tanah	23	6587	248	11	2944	199	5	2158	85
10. Tallo	48	14690	572	13	4447	319	4	1404	179
11. Panakkukang	50	13704	761	16	4491	269	11	5482	457
12. Manggala	37	11758	512	17	5690	380	11	5381	269
13. Biringkaya	47	17739	746	18	8753	595	9	5589	536
14. Tamalanrea	34	10708	411	16	4582	280	8	4410	342
Jumlah	493	150255	6790	192	62758	3984	117	54625	4837

Sumber, Dinas Pendidikan Kota Makassar (Makassar Dalam Angka 2013)

Tingginya rasio murid sekolah, seyogyanya dapat diantisipasi dengan memperbanyak sarana dan fasilitas ruang kelas di masing-masing sekolah. Demikian juga dengan ketersediaan tenaga pengajar di tingkat SD utamanya daerah-daerah terpencil dan daerah sulit, sangat perlu dilakukan penambahan dan redistribusi sehingga diperoleh keseimbangan rasio murid guru. Namun untuk tingkat SMP dan SMA rasio murid guru sudah baik. Dengan demikian harapan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dapat dicapai.

---

#### 5.4 Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk kelompok usia tertentu yang masih duduk di bangku sekolah. Indikator ini menunjukkan keadaan proses pendidikan yang diimplementasikan di masyarakat. Angka partisipasi sekolah yang disajikan dalam bab ini menunjukkan perbandingan antara banyaknya murid pada suatu jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 5.5  
Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun dan 16-18 Tahun  
Kota Makassar 2013 – 2014

Jenis Kelamin	2013			2014		
	7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	97,08	95,51	67,99	98,25	96,26	68,76
Perempuan	97,77	96,65	64,79	98,92	97,28	73,49
Laki-laki + Perempuan	97,41	96,15	66,44	98,57	96,78	71,08

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013 – 2014

Tabel 5.5 memperlihatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun di Kota Makassar. Tampak pola partisipasi sekolah penduduk Kota Makassar yang menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan semakin kecil partisipasi sekolahnya. Keadaan ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Namun ada pergeseran yang cukup menggembirakan bahwa selama kurun 2013 – 2014 terjadi peningkatan partisipasi sekolah pada semua jenjang usia sekolah.

Partisipasi sekolah dari penduduk usia 7-12 tahun di tahun 2014 mencapai 98,57 persen, ini dapat diartikan dari 100 penduduk usia 7-12 tahun ada sekitar 98 penduduk yang masih aktif

---

bersekolah. Untuk penduduk usia ini, partisipasi sekolah penduduk perempuan lebih besar dari pada laki-laki yaitu sekitar 98,25 persen dan perempuan sekitar 98,92 persen.

Pada kelompok umur 13-15 tahun, partisipasi sekolahnya lebih rendah dari partisipasi sekolah pada kelompok usia 7-12 tahun. Partisipasi sekolah pada kelompok ini mencapai sekitar 96,78 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, ada perbedaan yang cukup dimana partisipasi penduduk perempuan lebih tinggi dari laki-laki, yaitu 97,28 persen untuk perempuan dan 96,26 persen untuk laki-laki.

Pada kelompok umur 16-18 tahun, partisipasi sekolahnya juga nampak lebih rendah dibandingkan pada kelompok umur 13-15 tahun. Partisipasi sekolah pada kelompok ini mencapai 71,08 persen. Perbedaan yang cukup juga terjadi pada partisipasi penduduk perempuan yang lebih tinggi dari pada partisipasi penduduk laki-laki. Partisipasi penduduk laki-laki sebesar 68,76 persen, sedangkan partisipasi penduduk perempuan sebesar 73,49 persen.

Adanya program pendidikan gratis di Kota Makassar untuk sekolah SD dan SMP telah meningkatkan angka partisipasi sekolah di kota ini. Kemudian jika masih ada penduduk usia sekolah 7-18 tahun yang tidak dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, sangat perlu ditelusuri lebih lanjut. Kemudian perlu pembuktian lebih dalam dugaan bahwa penduduk usia sekolah 7-18 tahun di Kota Makassar banyak diantaranya yang putus sekolah karena kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan mereka lebih memilih masuk dalam angkatan kerja (bekerja) membantu kegiatan ekonomi orang tua.

#### **5.5 Kemampuan Membaca dan Menulis (Tingkat Buta Huruf)**

Kemampuan membaca dan menulis atau tingkat buta huruf terutama untuk penduduk yang berumur 10 tahun ke atas merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan program pembangunan di bidang pendidikan. Sebab kalau di suatu wilayah masih cukup banyak penduduk yang buta huruf, jelas merupakan indikator keteringgalan, sebab seseorang yang buta huruf relatif akan lebih sulit untuk menerima informasi dan pengetahuan baru.

---

Kemampuan membaca dan menulis merupakan kebutuhan mendasar, tanpa kependaian tersebut sulit rasanya untuk mengikuti perkembangan informasi sosial ekonomi global. Ukuran ini merupakan indikator dasar mutu sumber daya manusia yang di ukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi sumber daya manusia suatu masyarakat.

Melek huruf yang dimaksud adalah jika seseorang yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Yang dimaksud huruf lainnya misalnya huruf Arab, Bugis/Makasar, Jawa, Cina dan sebagainya. Sedangkan seseorang yang hanya dapat membaca atau menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf.

Tabel 5.5 menunjukkan tingkat kemampuan baca dan tulis penduduk berumur 10 tahun ke atas. Secara umum, selama kurun 2013 – 2014 kemampuan dapat membaca dan menulis penduduk meningkat. Hal itu ditandai dengan meningkatnya persentase penduduk yang dapat membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya serta menurunnya angka buta huruf. Tahun 2014 sekitar 98,36 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis, atau turun sekitar 0,53 persen dari keadaan tahun 2013 yang mencapai 97,83 persen.

Telaah lebih lanjut menurut jenis kelamin, nampak bahwa kemampuan membaca dan menulis penduduk perempuan lebih rendah dari laki-laki. Penduduk perempuan yang bisa membaca dan menulis sekitar 97,62 persen tahun 2014 dan penduduk laki-laki yang dapat membaca dan menulis sekitar 99,13 persen. Masih adanya penduduk yang buta huruf sebesar 1,64 persen, hal ini seringkali disebabkan angka buta huruf terjadi pada usia lanjut yang sudah enggan untuk belajar membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya.. Namun demikian keadaan ini cukup menggembirakan karena telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,17 persen meski memang harus terus dilakukan peningkatan kinerja program pendidikan, sehingga semakin meminimalkan penduduk yang buta huruf.

Tabel 5.6  
Kemampuan Baca Tulis Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas  
Kota Makassar 2013 – 2014

Jenis Kelamin	2013		2014	
	Dapat Membaca dan Menulis	Tidak Dapat	Dapat Membaca dan Menulis	Tidak Dapat
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
Laki-Laki	98,55	1,45	99,13	0,87
Perempuan	97,14	2,86	97,62	2,38
Laki-laki + Perempuan	97,83	2,17	98,36	1,64

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013 – 2014

### 5.6 Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan/Dimiliki

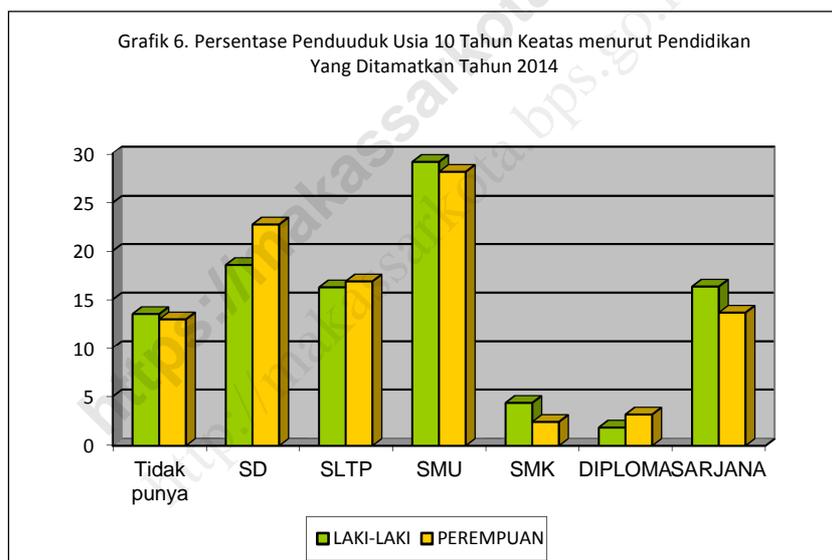
Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Sehingga potensi sumber daya manusia di suatu wilayah dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Tabel 5.7 memperlihatkan penduduk Kota Makassar usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2013-2014. Bahwa sebagai ibukota propinsi pusat kegiatan ekonomi dengan fasilitas pendidikan yang lengkap, memungkinkan penduduknya untuk memperoleh pendidikan yang tinggi dengan lebih mudah. Pada tahun 2014 sebagian besar penduduk yang berusia 10 tahun keatas berijazah SMA umum sebesar 28,65 persen. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2013 yang mencapai 34,58 persen. Penduduk yang berijazah DIV/S1/S2/S3 juga mengalami sedikit kenaikan dari 14,11 persen pada tahun 2013 menjadi 14,96 persen pada tahun 2014.

Tabel 5.7  
Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan  
Yang Ditamatkan di Kota Makassar 2013 – 2014

Pendidikan Yang Ditamatkan	2013			2014		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya Ijazah	5,61	8,14	6,91	13,51	12,96	13,23
SD	17,01	21,32	19,22	18,55	22,79	20,71
SLTP	16,42	17,74	17,10	16,25	16,86	16,56
SMU	36,89	32,38	34,58	29,16	28,15	28,65
SMA Kejuruan	5,48	3,63	4,53	4,35	2,42	3,37
D I/II	0,03	0,97	0,51	0,40	0,52	0,46
D III	2,69	3,37	3,04	1,45	2,65	2,06
D IV/SI/S2/S3	15,87	12,44	14,11	16,33	13,65	14,96

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013 – 2014



---

## BAB VI KETENAGAKERJAAN

Berbicara mengenai pembangunan tentu tercakup didalamnya tentang tenaga kerja. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu 44able44 penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin. Masalah yang timbul dalam ketenagakerjaan baik ditingkat nasional maupun regional adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja dari waktu ke waktu masih cukup tinggi, sementara pertumbuhan kesempatan kerja cukup rendah, akibatnya menimbulkan pengangguran, dan arus urbanisasi ke kota besar yang jelas-jelas tidak diinginkan oleh berbagai pihak. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja. Kemudian sejauh mana pemerintah mengambil strategi seperti itu dan menjalankannya seefektif mungkin, telah dianggap sebagai salah satu langkah yang penting artinya bagi keberhasilan pembangunan.

Secara internasional berdasarkan konsep dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, penduduk usia 15-64 tahun dikelompokkan sebagai tenaga kerja (Man Power), sedangkan di Indonesia menggolongkan penduduk usia 15 tahun keatas sebagai tenaga kerja. Batasan ini didasarkan pada kenyataan terdapat banyak penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja.

Melalui konsep *Labour Force Approach* dari bagian penduduk, tenaga kerja dapat dogolongkan mereka yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah mereka yang bekerja (untuk meghasilkan barang dan jasa) maupun yang belum (sedang mencari pekerjaan). Tenaga kerja yang tidak termasuk angkatan kerja yaitu mencakup mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumahtangga, tidak mampu melakukan kegiatan dan lainnya.

Informasi ketenagakerjaan sangat penting terutama untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya mengatasi masalah

pengangguran tetapi juga sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan para tenaga kerja dan peningkatan produktifitas secara makro. Dalam ketenagakerjaan dikenal bernagai indikator seperti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), Tingkat pengangguran (TP), distribusi pekerja menurut sektor usaha.

### 6.1. Penduduk Menurut Jenis Kegiatan

Tabel 6.1 menyajikan persentase penduduk usia 15 tahun keatas menurut kegiatan utama selama seminggu yang lalu di Kota Makassar tahun 2014. Tabel ini menunjukkan bahwa dari seluruh penduduk angkatan kerja sekitar 50,65 persen penduduk usia 15 tahun keatas tergolong bekerja dan sekitar 6,22 persen yang sedang mencari pekerjaan.

Tabel 6.1  
Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Kegiatan Utama Slama Seminggu Yang Lalu  
Di Kota Makassar, 2012 dan 2014

Tahun	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja		
	Bekerja	Mencari Kerja	Sekolah	Mengurus Rumah tangga	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2012	52,18	5,78	15,43	20,91	5,70
2014	50,65	6,22	20,16	20,02	2,96

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakemas 2012 dan 2014

---

## 6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas).

Tabel 6.2  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Usia 15 tahun Keatas  
Di Kota Makassar 2012 dan 2014

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	73,22	43,56	9,92	10,03
2014	72,18	42,25	8,06	15,63

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2012 dan 2014

Dari tabel 6.2 disajikan indikator ketenagakerjaan pada tahun 2012 dan 2014. Pada rentang waktu tersebut menunjukkan trend penurunan TPAK baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2014 TPAK penduduk laki-laki Kota Makassar sekitar 72,18 yang berarti dari 100 orang yang usia kerja sebanyak 72 orang penduduk laki-laki yang masuk sebagai angkatan kerja sedangkan sisanya sebagai penduduk bukan angkatan kerja. Sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 42,25.

Seperti di negara-negara berkembang pada, pengangguran masih menjadi persoalan ekonomi di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh tidak terserapnya sebagian angkatan kerja dalam sektor kegiatan ekonomi (lapangan pekerjaan). Dengan kata lain pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja baru. Sehingga sangat diperlukan data mengenai pencari

---

pekerjaan sebagai bahan untuk pertimbangan mengenai masalah ketenagakerjaan. Selanjutnya bagian dari angkatan kerja yang saat ini tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan, dapat diartikan pula sebagai tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Tingkat pengangguran pada tahun 2012-2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,86 persen dibanding tahun 2013, sementara TPT perempuan justru mengalami peningkatan sebesar 5,6 persen. Kondisi perekonomian yang tidak stabil saat ini turut mempengaruhi angka TPAK dan TPT di Kota Makassar, sehingga masalah pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama.

### **6.3 Lapangan Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan**

Aktifitas ekonomi suatu wilayah dapat ditunjukkan melalui distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha. Tabel 6.3 memperlihatkan bahwa aktifitas ekonomi penduduk Kota Makassar terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan jasa. Pada tahun 2012, sektor perdagangan menyerap 31,96 persen pekerja di kota Makassar dan sektor jasa sebesar 36,96 persen.

Pada table 6.3 , selama tahun 2012 alokasi lapangan usaha sebagai tanda aktifitas ekonomi di Kota Makassar nampak terjadi pergeseran, meski sektor perdagangan dan jasa masih mendominasi. Pada sektor perdagangan terjadi penurunan daya serap, dari 36,18 persen di tahun 2011, turun menjadi 31,96 persen pada tahun 2012. Namun sektor jasa kemasyarakatan di tahun 2011 dari 33,36 persen, naik menjadi 36,96 persen pada tahun 2012. Dan sektor industri menurun sekitar 0,07 poin dari 5,64 persen menjadi 5,57 persen tahun 2012. Sektor Lainnya (Bangunan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, Tanah dan jasa perusahaan) selama tahun 2011-2012 mengalami kenaikan sekitar 0,89 poin, dari 24,16 persen menjadi 25,05 persen

Tabel 6.3  
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu  
menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kota Makassar, 2011 – 2012

Lapangan Pekerjaan Utama (1)	2011			2012		
	L (2)	P (3)	L+P (4)	L (2)	P (3)	L+P (4)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan perikanan	3.613 (1,06)	- (0,00)	3.613 (1,06)	2.336 (0,76)	0 (0,00)	2.336 (0,47)
Industri Pengolahan	17.477 (5,14)	13.065 (6,49)	30.542 (5,64)	12.082 (3,92)	15.884 (8,17)	27.966 (5,57)
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, Hotel	104.223 (30,69)	91.502 (45,42)	195.725 (36,18)	88.464 (28,73)	72.092 (37,09)	160.556 (31,96)
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	98.375 (28,97)	82.109 (40,76)	180.484 (33,36)	101.155 (32,85)	84.525 (43,48)	185.680 (36,96)
Lainnya *)	115.902 (34,13)	14.784 (7,34)	130.686 (24,16)	103.880 (33,74)	21.890 (11,26)	125.770 (25,05)

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakemas 2011-2012

Catatan: Lainnya\*) Pertambangan dan Penggalian, Bangunan, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan

Selaras dengan dominannya sektor perdagangan dalam menyerap tenaga kerja, jenis pekerjaan pada kelompok tenaga usaha penjualan nampak dominan pula. Pada tabel 6.4 penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut jenis pekerjaan tenaga usaha penjualan terlihat turun 18,78 poin dari 42,59 persen tahun 2011 turun mencapai 23,81 persen tahun 2012, kemudian diurutkan kedua ditempati oleh kelompok tenaga produksi, operator alat-alat dan pekerja kasar yang mencapai 29,53 persen tahun 2011. Turun menjadi 26,78 persen tahun 2012 atau

turun sekitar 2,75 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin pada tabel 6.4, pekerja laki-laki lebih cenderung pada kelompok tenaga produksi, operator alat-alat dan pekerja kasar. Sedangkan pekerja perempuan lebih dominan pada tenaga usaha penjualan. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 6.4  
Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu menurut Jenis Pekerjaan Kota Makassar, 2011-2012

Jenis Pekerjaan (1)	2011			2012		
	L (2)	P (3)	L+P (4)	L (2)	P (3)	L+P (4)
Tenaga Profesional	39.611 (10.59)	41.693 (14.26)	81.304 (11.96)	47.014 (15,26)	34.419 (17.71)	81.433 (16.21)
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	13.197 (4.15)	2.576 (1.36)	15.765 (3.11)	11.176 (3,62)	750 (0.39)	11.936 (2.38)
Tenaga Usaha Penjualan	36.043 (32.82)	43.249 (58.94)	79.296 (42.59)	58,612 (19,03)	10.527 (5.41)	119.621 (23.81)
Tenaga Usaha Jasa	103.453 (11.10)	90.777 (11.80)	194.216 (11.36)	65.668 (21.32)	70.403 (36.21)	136.071 (27.09)
Tenaga Usaha Pertanian	6.984 (2.20)	361 (0.19)	7.340 (1.45)	659 (0.21)	- (0.00)	659 (0.13)
Tenaga Produksi, Operator alat Alat angkutan dan Pekerja Kasar	124.335 (39.14)	25.483 (13.45)	149.740 (29.53)	106700 (34.65)	27.810 (14.31)	134.510 (26.78)

Sumber : BPS Kota Makassar, Sakernas 2011-2012

---

#### 6.4. Status Pekerjaan

Indikator ketenagakerjaan lainnya menunjukkan tingkat kesejahteraan adalah status pekerjaan penduduk, yakni kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha. Status pekerjaan dibedakan menjadi tujuh kategori, yakni berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga. Status pekerjaan ini dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui status pekerjaan formal dan informal. Indikasi berkembangnya sektor informal dapat dilihat melalui peningkatan jumlah pekerja dengan status berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga dan pekerja bebas. Status pekerjaan ini juga dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui status pekerjaan formal dan informal.

Pada Tabel 6.5 berikut ini, memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2012, pekerja formal di Kota Makassar kebanyakan berstatus buruh/karyawan, dengan persentase mencapai 65,31 persen. Sementara pada sektor informal tahun 2012 ditunjukkan melalui persentase penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri sebesar 14,89 persen, yakni 14,41 persen pekerja laki-laki dan 15,63 persen, sementara yang bekerja dengan status pekerja bebas di non pertanian seperti (buruh bangunan, pemulung, tukang cuci, tukang parkir) sekitar 7,02 persen yakni pekerja perempuan mencapai 3,55 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap mencapai sekitar 4,44 persen dan yang bekerja sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar sekitar 3,99 persen.

Tabel 6.5  
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu  
Menurut Status Pekerjaan Kota Makassar, 2012

Status Pekerjaan Utama	2012					
	Laki-laki	%	Perempuan	%	L+P	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha sendiri	44.384	14.41	30.385	15.63	74.769	14.89
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	11.676	3.79	10.606	5.46	22.282	4.44
Berusaha dibantu buruh tetap	16.291	5.29	5.555	2.86	2.184	0.43
Buruh/karyawan	201.288	65.37	126.793	65.22	328.081	65.31
Pekerja bebas di non pertanian	28.377	9.22	6.896	3.55	35.273	7.02
Pekerja keluarga	5.901	1.92	14.156	7.28	20.057	3.99
Jumlah	307.917	100	194.391	100	502.308	100

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Sakernas 2012

### 6.5. Lama Jam Bekerja

Salah satu ukuran untuk menentukan bagaimana produktifitas pekerja dan ukuran setengah pengangguran dan tenaga kerja penuh adalah jumlah jam bekerja yang digunakan pekerja untuk bekerja dalam seminggu. Batasan yang biasanya dipakai untuk mengukur jam kerja adalah lebih 35 jam/minggu, artinya jika yang bekerja kurang dari jam kerja normal dikatakan sebagai pekerja penganggur/setengah bekerja. Pada tabel 6.6 tampak bahwa 87,79 persen penduduk Kota Makassar yang bekerja selama 35 jam keatas dalam seminggu yakni 90.71 persen laki-laki dan 83.18 persen perempuan pada tahun 2012.

Tabel 6.6  
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu  
Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya di Kota Makassar, 2012

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya	2012					
	Laki-laki	(%)	Perempuan	(%)	L+P	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	2.570	0.83	1.868	0.96	4.438	0,88
1 – 14	4.167	1.35	7.049	3.63	11.216	2,23
15 – 34	21.878	7.11	23.788	12.24	45.666	9,09
35 +	279.302	90.71	161.686	83.18	440.988	87,79
Jumlah	307.917	100	194.391	100	502.308	100

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Sakernas 2012

---

## **BAB VII PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping sandang dan pangan. Rumah selain berfungsi sebagai tempat istirahat atau berlindung dari hujan dan panasnya matahari, juga berfungsi sebagai tempat untuk membina kehidupan rumah tangga dan bersosialisasi antar individu dalam rumah dan mengembangkan diri. Pemerintah telah berupaya untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan rumah melalui berbagai program diantaranya menyediakan fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR).

Rumah dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur tingkat sosial masyarakat dan keberhasilan pembangunan di bidang perumahan. Keberadaan rumah yang dimaksud tidak saja menyangkut kuantitas tetapi juga mengenai kualitas rumah. Kondisi fisik bangunan menunjukkan kualitas dan kuantitas tempat tinggal yang dikuasai. Fisik bangunan yang kuat dan terbuat dari bahan yang tidak membahayakan menjamin keamanan penghuni tidak saja dari ancaman tindak kriminal, tetapi juga dari kerentanan bangunan itu sendiri dan kemungkinan terserang penyakit. Fisik bangunan yang kuat ditentukan oleh pemilihan bahan komponen bangunan yaitu lantai, dinding, dan atap. Fasilitas rumah yang tidak memadai dan kondisi lingkungan yang tidak sehat juga akan berpengaruh terhadap kesehatan.

### **7.1 Status Penguasaan Rumah**

Indikator ini memperlihatkan status penguasaan rumah yang dibedakan atas milik sendiri, kontrak, sewa, rumah dinas, bebas sewa dan lainnya. Pada umumnya rumahtangga yang memiliki tempat tinggal sendiri, diperkirakan tingkat kesejahteraannya lebih baik, dibanding mereka yang masih kontrak, sewa atau lainnya. Semakin tinggi persentase rumahtangga yang menempati tempat tinggal sendiri disuatu daerah, akan semakin baik tingkat kesejahteraan daerah tersebut.

Tabel 7.1 memperlihatkan status penguasaan bangunan tempat tinggal oleh rumahtangga di Kota Makassar pada tahun 2013 dan 2014. Selama kurun waktu 2013-2014, nampak terjadi peningkatan pada penguasaan bangunan tempat tinggal dengan status milik sendiri. Pada tahun 2013, bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh pemiliknya sendiri mencapai 55,69 persen, kemudian naik menjadi 59,45 persen di tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekitar 40,55 persen rumah tangga belum mempunyai rumah milik sendiri.

Penguasaan tempat tinggal bukan milik sendiri oleh rumahtangga dipengaruhi beberapa faktor antara lain; keadaan ekonomi dan sosial masyarakat yaitu rendahnya pendapatan, alasan pendidikan, lokasi tempat kerja dan memilih tinggal bersama keluarga/sanak saudara

Tabel 7.1  
Rumahtangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal  
Kota Makassar, 2013– 2014

Status Penguasaan	2013	(%)	2014	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Milik Sendiri	178.573	55,69	200.786	59,45
Kontrak	54.928	17,29	44.345	13,13
Sewa	23.386	7,47	19.454	5,76
Bebas Sewa milik	8.810	2,81	10.808	3,20
Dinas	43.301	13,83	51.573	15,27
Milik orang tua/sanak/ saudara	9.268	2,86	10.369	3,07
Lainnya	122	0,04	405	0,12

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013– 2014

---

## 7.2 Kondisi Fisik Bangunan Tempat Tinggal

Kenyamanan tempat tinggal tidak bisa dipisahkan dari luas lantai dan jenis bahan bangunan, makin luas lantai hunian diimbangi dengan kualitas bahan bangunan yang digunakan makin baik pula kesejahteraan penghuninya. Luas lantai dan jenis bahan bangunannya, merupakan unsur penting dalam menciptakan kondisi kenyamanan dan kesehatan bagi penghuninya. Diperkirakan semakin luas lantai hunian dan semakin baik kualitas bahan bangunan yang digunakan akan menciptakan kondisi, yang semakin nyaman dan sehat bagi penghuninya.

Rata-rata luas lantai per anggota rumahtangga akan memberikan gambaran tentang tingkat kenyamanan suatu rumah bagi penghuninya. Jika rata-rata anggota rumahtangga di Kota Makassar berkisar antara 4 sampai 5 orang, dan standar normatif luas lantai perkapita seluas 8 m<sup>2</sup> maka luas lantai hunian yang diharapkan setiap rumahtangga adalah berkisar antara 32 – 40 m<sup>2</sup>.

Keadaan rumahtangga menurut luas lantai bangunan tempat tinggal selama tahun 2014 menunjukkan bahwa rumahtangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 20 meter persegi sekitar 12,81 persen. Selanjutnya rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai 20-49 m<sup>2</sup> sekitar 25,39 persen. Sementara itu, rumahtangga paling banyak menempati rumah dengan luas lantai 50-99 m<sup>2</sup>, yakni mencapai 47,51 persen, sedangkan rumahtangga dengan lantai terluas 100 m<sup>2</sup> keatas mencapai 14,29 persen.

Dengan melihat kondisi luas lantai bangunan tempat tinggal di kota Makassar, tampaknya masih perlu perhatian dari pihak terkait yang ditujukan terutama bagi rumahtangga yang menempati bangunan luas lantai yang relatif sempit.

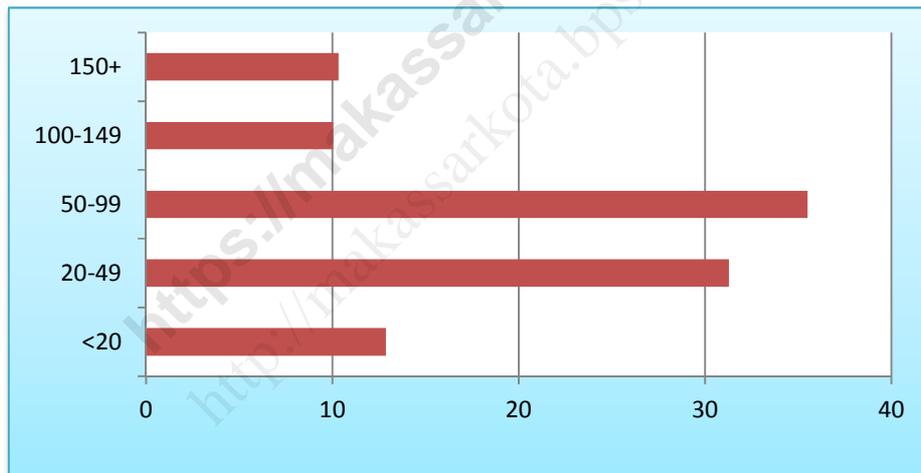
Tabel 7.2 memperlihatkan kondisi fisik bangunan yang ditempati oleh rumahtangga di Kota Makassar. Secara umum dalam kurun 2013-2014 distribusi rumahtangga menurut kondisi fisik bangunan tempat tinggal di Kota Makassar tidak mengalami perubahan yang berarti.

Tabel 7.2  
 Persentase Rumah tangga menurut Luas Lantai di Kota Makassar  
 Tahun 2013 dan 2014

Luas Lantai	2013	%	2014	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- < 20	41.268	12,87	43.264	12,81
- 20 – 49	86.025	31,27	85.752	25,39
- 50 – 99	104.306	35,49	160.460	47,51
- 100 – 149	37.504	10,03	48.263	14,29
- 150 +	33.179	10,34	-	-

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013 dan 2014

Grafik 7  
 Persentase Rumah tangga Menurut Luas Lantai  
 Kota Makassar Tahun 2014

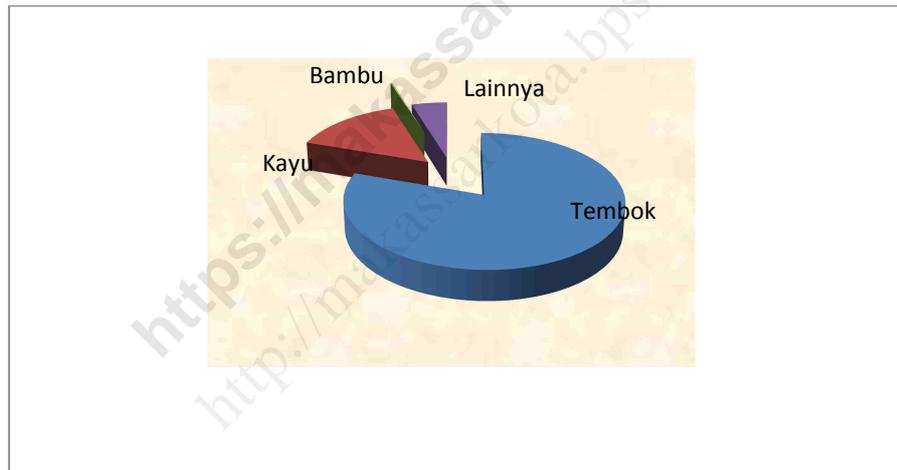


Tabel 7.3  
 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kota Makassar  
 Tahun 2013 dan 2014

Jenis Dinding	2013	%	2014	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Tembok	250.657	78,17	271.204	80,30
- Kayu	44.956	14,02	49.749	14,73
- Bambu	481	0,15	912	0,27
- Lainnya	24.562	7,66	15.874	4,70

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013-2014

Grafik 8. Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terluas Di Kota Makassar, 2013



Keadaan rumahtangga menurut dinding terluas tahun 2013 dan 2014 disajikan pada tabel 7.3. Pada tabel ini jenis dinding terluas dibagi dalam empat kelompok, yaitu jenis dinding tembok, kayu, bambu dan lainnya. Tabel 7.3 menunjukkan sebagian besar jenis dinding terluas yang dihuni oleh rumah tangga sudah berupa tembok, yaitu sebesar 80,30 persen, berupa kayu sebesar 14,73 persen, berupa bambu 0,27 persen dan jenis dinding lainnya sebesar 4,70 persen. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar dinding terluas di setiap rumahtangga di Kota Makassar sudah merupakan dinding yang permanen karena berupa tembok.

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga seseorang yang mendiami terlindung dari terik sinar matahari, hujan dan sebagainya. Untuk jenis bangunan bertingkat, yang dimaksud atap disini adalah bagian yang paling atas dari bangunan tersebut.

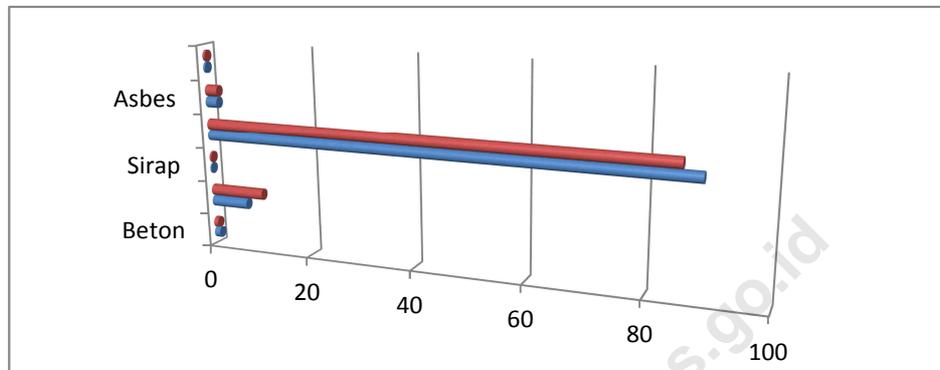
Pada tahun 2014 sebagian besar rumahtangga sudah menempati bangunan tempat tinggal dengan atap seng sebagai atap terluas, yakni mencapai 85,59 persen.

Tabel 7.4  
 Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Makassar  
 Tahun 2013 - 2014

Jenis Atap	2013	%	2014	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Beton	3.527	1,10	2.769	0,82
- Genteng	22.863	7,13	35.125	10,40
- Sirap	705	0,22	1.182	0,35
- Seng	285.095	88,91	289.071	85,59
- Asbes	7.183	2,24	7.971	2,36
- Lainnya	1.283	0,40	1.621	0,48

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013 - 2014

Grafik 9. Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Makassar Tahun 2013 dan 2014



Persyaratan lain dari rumah sehat, oleh Depkes adalah lantai rumah harus kering / tidak lembab. Oleh karena itu bahan penutup lantai harus terbuat dari teraso, ubin/tegel, batu bata, atau plur/semen (untuk rumah bukan panggung/tingkat) dan terbuat dari kayu atau bambu (untuk rumah panggung).

### 7.3 Fasilitas Tempat Tinggal

#### 7.3.1 Sumber Air Minum

Kenyamanan tempat tinggal juga tidak bisa dipisahkan dari kelengkapan, kelayakan dan penggunaan fasilitas tempat tinggal. Air merupakan kebutuhan yang vital, dibutuhkan oleh setiap orang. Air digunakan untuk minum, mandi dan mencuci. Sehat atau bersih tidaknya air yang digunakan akan bergantung pada sumbernya. Penggunaan air bersih dan pemilikan fasilitas air minum dapat dijadikan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan. Semakin banyak rumahtangga yang memanfaatkan air bersih, menunjukkan semakin baiknya kondisi kesehatan rumahtangga. Demikian halnya dengan semakin banyaknya rumahtangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri cenderung semakin baik tingkat kesejahtraannya. Air minum yang dianggap

memenuhi syarat kesehatan adalah yang bersumber dari ledeng. Karena sebelum air di distribusikan ke rumah penduduk terlebih dahulu dilakukan proses penjernihan. Selain itu yang termasuk kategori air bersih adalah air yang bersumber dari pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Kebutuhan akan air bersih, terutama untuk bahan baku air yang berkualitas, bila ditinjau dari segi kesehatan dirasakan semakin hari semakin penting. Ini mengingat semakin tingginya permintaan akan air bersih oleh rumahtangga, yang tidak dapat diimbangi penyediaannya oleh alam secara memadai, mengingat daya dukung sumber daya yang terbatas.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat sumber air minum yang dikonsumsi rumahtangga adalah dengan melihat sumber air minum yang digunakan oleh rumahtangga tersebut.

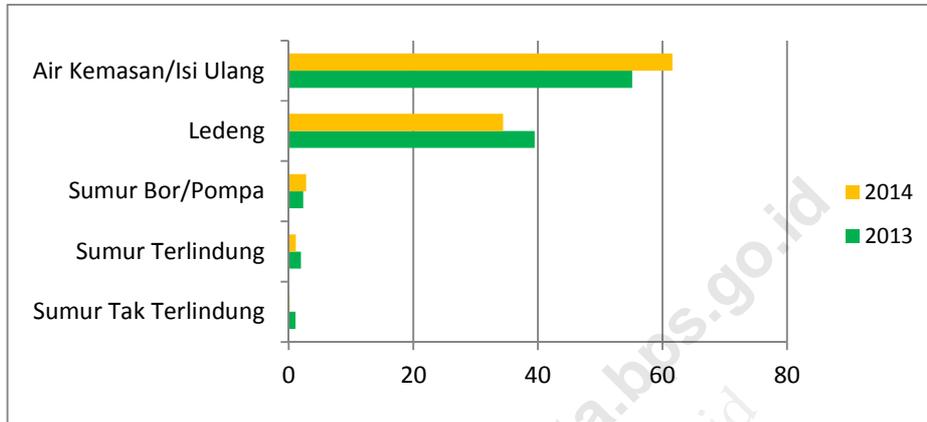
Rumah tangga di Kota Makassar tahun 2014 yang menggunakan air dalam kemasan/air isi ulang dan Air Ledeng (PDAM) sebagai sumber air minum utama menempati urutan pertama dan kedua sebagai sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dengan masing-masing persentasenya sebesar 61,59 persen dan 34,43 persen. Sedangkan yang menggunakan air sumur bor/pompa sebagai sumber air minum yaitu sekitar 2,75 persen, air sumur terlindung sekitar 1,09 persen dan sumur tak terlindung sekitar 0,14 persen.

Tabel 7.5  
Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Makassar  
Tahun 2013-2014

Sumber Air Minum	2013	2014
(1)	(3)	(5)
- Air dalam kemasan/Isi Ulang	55,15	61,59
- Ledeng	39,53	34,43
- Sumur bor/pompa	2,30	2,75
- Sumur terlindung	1,98	1,09
- Sumur tak terlindung	1,05	0,14

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013-2014

Grafik 10. Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Makassar  
Tahun 2013 dan 2014



### 7.3.2 Fasilitas Buang Air Besar

Fasilitas buang air besar merupakan salah satu fasilitas tempat tinggal yang sangat penting, karena berhubungan erat dengan sanitasi lingkungan tempat tinggal, terutama berupa penggunaan kloset dan tempat penampungan akhir kotoran/tinja. Fasilitas buang air besar yang dianggap memenuhi syarat kesehatan adalah kakus yang menggunakan kloset leher angsa atau plengsengan dengan penampungan akhir berupa tangki septik. Tangki septik dapat mencegah limbah untuk tidak mencemari lingkungan terutama air sumur yang dibuat/berada di sekitar tempat tersebut.

Dari table 7.6 dapat dilihat bahwa persentase rumahtangga dalam menggunakan tempat buang air besar dengan fasilitas tempat buang air besar digunakan oleh rumahtangga itu sendiri tahun 2013 sebesar 73,26 persen dan 82,06 persen tahun 2014, sedangkan untuk fasilitas tempat buang air besar rumahtangga yang digunakan bersama pada tahun 2013 sebesar 23,17 persen dan

13,92 persen tahun 2014. Selebihnya untuk fasilitas tempat buang air besar yang digunakan oleh rumanhtangga yaitu fasilitas buang air besar ditempat umum sebesar 4,02 persen.

Tabel 7.6

Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Di Kota Makassar Tahun 2013 dan 2014

Fasilitas Tempat Tinggal	2013	%	2014	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Fasilitas Tempat BAB</b>				
- Sendiri	234.913	73,26	277.149	82,06
- Bersama	74.296	23,17	47.013	13,92
- Umum	5.098	1,59	13.577	4,02
- Tidak ada	6.349	1,59	-	-
<b>Tempat Pembuangan Akhir Tinja</b>				
- Tangki	311.197	97,05	329.329	97,51
- Kolam/Sawah	737	0,23	270	0,08
- Sungai/Danau/Laut	6.926	2,16	6.181	1,83
- Lobang Tanah	1.315	0,41	1.520	0,45
- Pantai/Tanah Lapang/Kebun	0	0,00	-	-
- Lainnya	481	0,15	439	0,13

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013 dan 2014

### 7.3.3 Fasilitas Penerangan

Fasilitas listrik juga banyak memberikan efisiensi dan produktivitas pada pemakaian sebagai sumber penerangan. Pada tabel 7.7 untuk sumber penerangan sebagian besar

rumah tangga sudah menggunakan listrik tanpa melihat apakah bersumber dari PLN maupun non PLN. Untuk tahun 2014 yaitu sekitar 99,32 persen sudah menggunakan sumber penerangan listrik dari PLN dan rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik non PLN (Genset) utamanya masyarakat atau rumah tangga yang bertempat tinggal di daerah Pulau yaitu sekitar 0,68 persen.

Tabel 7.7  
Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Penerangan Di Kota Makassar  
Tahun 2013 dan 2014

Fasilitas Penerangan	2013	%	2014	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Listrik PLN	318.123	99,21	335.442	99,32
- Listrik non PLN	2.533	0,79	2.297	0,68
- Petromaks	0	0,00	0	0
- Pelita/Lainnya	0	0,00	0	0

Sumber : BPS Kota Makassar, Susenas 2013 dan 2014

Grafik 11. Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Penerangan di Kota Makassar  
Tahun 2013 dan 2014



---

## BAB VIII

### INDIKATOR LAINNYA

Pengeluaran rumahtangga dapat dibedakan menurut pengeluaran makanan dan bukan makanan, dimana menggambarkan bagaimana penduduk Kota Makassar mengalokasikan kebutuhan rumahtangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, nilai pengeluaran rumahtangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk, khususnya dilihat dari segi ekonomi.

#### 8.1 Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Bagi rumah tangga dibanding dengan pemenuhan kebutuhan non makanan. Sebaliknya rumah tangga yang berpenghasilan tinggi atau relatif lebih besar, pengeluarannya cenderung lebih banyak digunakan untuk kebutuhan non makanan. Kondisi ini mencerminkan bahwa semakin tinggi pendapatan rumah tangga, maka pola konsumsi lebih besar untuk keperluan konsumsi non makanan.

Pergeseran pola pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dari makanan ke non makanan dapat dijadikan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan dikatakan membaik, jika perbandingan pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan semakin menurun dan diiringi peningkatan kebutuhan untuk bukan makanan.

Pengeluaran perkapita menurut golongan pengeluaran perkapita makanan dan non makanan dapat dilihat pada tabel 8.1 berikut ini.

Tabel 8.1  
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Per Bulan  
Kota Makassar Tahun 2014

Golongan pengeluaran	Makanan	%	Non Makanan	%
< 100.000	3.144	0,22	34.302	2,40
100.000 – 149.999	37.303	2,61	212.242	14,85
150.000 – 199.999	92.615	6,48	108.765	7,61
200.000 – 299.999	291.994	20,43	207.097	14,49
300.000 – 499.999	489.230	34,23	281.704	19,71
500.000 – 749.999	341.017	23,81	242.542	16,97
750.000 – 999.999	113.911	7,97	109.909	7,69
>= 1.000.000	60.028	4,20	232.681	16,28
Jumlah	1.429.242		1.429.242	

*Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2014*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kelompok pengeluaran perkapita makanan pada tahun 2014 lebih dominan pada kelompok Rp 300.000 – 499.999, kemudian disusul level Rp Rp. 500.000 – 749.000 dan 200.000 – 299.999 dan. Sedangkan pada kelompok pengeluaran non makanan, hampir tidak ada perbedaan yang signifikan disemua golongan pengeluaran kecuali pada level <100.000.

Pengeluaran perkapita sebulan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 8.2. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pengeluaran rata-rata sebulan penduduk Kota Makassar menurut pengeluaran makanan sebesar Rp 467.109,- dan non makanan sebesar Rp 583.616,- tahun 2014.

Tabel 8.2  
Pengeluaran perkapita sebulan dan pola konsumsi di Kota Makassar 2013-2014

Pengeluaran perkapita sebulan (Rp)				Pola konsumsi penduduk (%)			
Makanan		Non Makanan		Makanan		Non Makanan	
2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
416.152	467.109	576.653	583.616	41,92	44,46	58,08	55,54

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2013-2014

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 pola konsumsi penduduk untuk non makanan pada tahun 2013 mengalami penurunan sekitar 2,54 poin, yakni 58,08 persen tahun 2013 menjadi 55,54 persen tahun 2014 sedangkan untuk konsumsi makanan tahun 2014 sekitar 44,46 persen dibandingkan tahun 2013 yang hanya 41,92 persen atau naik sekitar 2,54 persen.

Jika melihat besarnya pengeluaran perkapita untuk konsumsi makanan dibandingkan non makanan maka dapat dilihat bahwa pengeluaran perkapita penduduk kota Makassar untuk non makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi makanan. Hal ini juga memberikan gambaran bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat relative lebih baik.

## 8.2 Kemiskinan

Miskin adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang/rumahtangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan yang layak bagi kehidupan. Penduduk atau rumahtangga miskin yang mengalami masalah/hambatan untuk dapat hidup secara

---

layak, secara konseptual disebut sebagai fakir miskin dan digolongkan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) .

Sesuai dengan definisi yang disepakati fakir miskin adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum, baik berupa kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial.

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori energi perkapita perhari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok.

Penduduk dengan pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan diklasifikasikan sebagai penduduk miskin demikian pula penghitungan untuk penduduk fakir miskin. Pemanfaatan data kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS biasanya digunakan Pemerintah untuk perencanaan makro, khususnya untuk menentukan alokasi dan besaran dana untuk membantu penduduk miskin dan fakir miskin, baik untuk tingkat nasional maupun tingkat wilayah.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk

---

mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain “ seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”.

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumahtangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

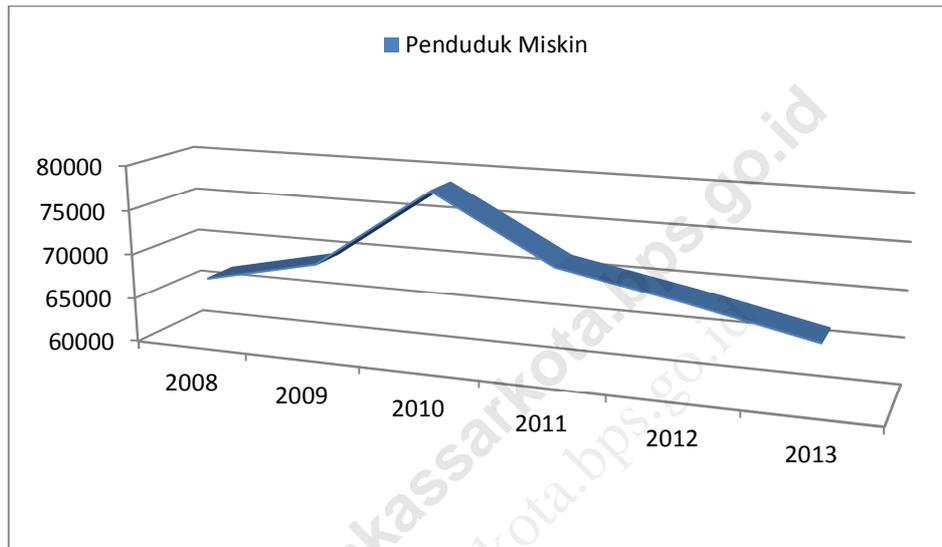
Tabel 8.3  
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase, dan Garis Kemiskinan di Kota Makassar  
Tahun 2008 – 2013

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Pend.Miskin (000)	66,9	69,7	78,7	71,7	69,2	66,4
Persentase pend.Miskin (%)	5,36	5,52	5,86	5,29	5,02	4,70
Garis Kemiskinan	177.064	209.582	233.815	242.034	250.542	273.231

(Rp/Kapita/Bulan)						
-------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : BPS Kota Makassar, Hasil Susenas 2008-2013

Grafik 12. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar Tahun 2008-2013



Jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2012. Secara absolut jumlah penurunan penduduk miskin pada periode 2013 sebesar 3,5 ribu jiwa, yaitu 69,9 ribu jiwa pada tahun 2012 menjadi 66,4 ribu jiwa pada tahun 2013.

Perubahan tingkat kemiskinan selama setahun terakhir ini dapat dilihat melalui analisis tren tingkat kemiskinan antara kondisi tahun 2012 dan tahun 2013. Analisis ini mencakup jumlah

---

penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan mencakup garis kemiskinan, kemiskinan. Lebih jelasnya dapat dilihat tabel lampiran 3.

### **8.2.1 Garis Kemiskinan**

Garis kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, khusus di Kota Makassar pada tahun 2012 – 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp.16.454,- perkapita per bulan, yaitu dari Rp. 256.777,- pada tahun 2012 menjadi Rp.273.231 tahun 2013,-. (Tabel lampiran 3)

### **8.2.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**

Jumlah penduduk miskin di Kota Makassar tahun 2013 sebesar 66,4 ribu jiwa, angka ini mengalami penurunan sebanyak 3,5 ribu jiwa dari tahun 2012, dimana jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 sebesar 69,9 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 yang mencapai angka 863,2 ribu jiwa, kota Makassar merupakan Kabupaten/Kota yang menduduki peringkat kedua jumlah terbanyak penduduk miskinnya setelah kabupaten Bone. Jumlah penduduk miskin Kota Makassar mencapai 7,70 persen dari total penduduk miskin yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah ini cenderung menurun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2012 lalu yang mencapai angka 8,61 persen. (Tabel lampiran 3).

Lampiran Tabel 1

Jumlah Penduduk Pertengahan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota  
Tahun 2011-2013

Kode	Kab/Kota	2011	2012	2013	Pertumbuhan 2011-2012 (%)	Pertumbuhan 2012-2013 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Selayar	123,283	124,553	127,220	1.03	2.14
2	Bulukumba	398,531	400,990	404,896	0.62	0.97
3	Bantaeng	178,477	179,505	181,006	0.58	0.84
4	Jeneponto	346,149	348,138	351,111	0.57	0.85
5	Takalar	272,316	275,034	280,590	1.00	2.02
6	Gowa	659,512	670,465	696,096	1.66	3.82
7	Sinjai	231,182	232,612	234,886	0.62	0.98
8	Maros	322,212	325,401	331,796	0.99	1.97
9	Pangkep	308,814	311,604	317,110	0.90	1.77
10	Barru	167,653	168,034	169,302	0.23	0.75
11	Bone	724,905	728,737	734,119	0.53	0.74
12	Soppeng	226,079	226,202	225,512	0.05	-0.31
13	Wajo	388,985	389,552	390,603	0.15	0.27
14	Sidrap	274,648	277,451	283,307	1.02	2.11
15	Pinrang	354,652	357,095	361,293	0.69	1.18
16	Enrekang	192,163	193,683	196,394	0.79	1.40
17	Luwu	335,828	338,609	343,793	0.83	1.53
18	Tana Toraja	223,306	224,523	226,212	0.54	0.75
22	Luwu Utara	290,365	292,765	297,313	0.83	1.55
25	Luwu Timur	245,515	250,608	263,012	2.07	4.95
26	Toraja Utara	218,943	220,304	222,393	0.62	0.95
71	Makassar	1,352,136	1,369,606	1,408,072	1.29	2.81
72	Pare-Pare	130,563	132,048	135,192	1.14	2.38
73	Palopo	149,421	152,703	160,819	2.20	5.31
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>8,115,638</b>	<b>8,190,222</b>	<b>8,342,047</b>	<b>0.92</b>	<b>1.82</b>

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas

Lampiran Tabel 2

Jumlah Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014

		APS 7-12 Tahun		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
		sekolah	sekolah	Sekolah
		Mean	Mean	Mean
Kabupaten/kota	7301. Kepulauan Selayar	98,30	98,82	98,55
	7302. Bulukumba	97,37	97,58	97,47
	7303. Bantaeng	97,44	98,96	98,15
	7304. Jeneponto	96,32	99,56	97,84
	7305. Takalar	98,58	100,00	99,36
	7306. Gowa	98,47	100,00	99,26
	7307. Sinjai	98,83	98,64	98,74
	7308. Maros	98,56	99,14	98,81
	7309. Pangkepene Kepulauan	99,33	99,14	99,23
	7310. Barru	100,00	100,00	100,00
	7311. Bone	97,62	99,29	98,41
	7312. Soppeng	99,30	100,00	99,62
	7313. Wajo	98,28	100,00	99,05
	7314. Sidenreng Rappang	98,51	100,00	99,20
	7315. Pinrang	99,40	100,00	99,69
	7316. Enrekang	100,00	99,30	99,64
	7317. Luwu	98,59	99,35	98,92
	7318. Tana Toraja	99,39	97,96	98,66
	7322. Luwu Utara	99,33	98,80	99,06
	7325. Luwu Timur	100,00	99,37	99,68
	7326. Toraja Utara	98,89	100,00	99,41
	7371. Makassar	98,25	98,92	98,57
	7372. Pare Pare	98,10	100,00	98,93
7373. Palopo	100,00	100,00	100,00	
Provinsi	Sulawesi Selatan	98,54	99,31	98,91

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Juli 2014

Lampiran Tabel 3

Jumlah Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014

		APS 13-15 Tahun		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
		sekolah	sekolah	Sekolah
		Mean	Mean	Mean
Kabupaten/kota	7301. Kepulauan Selayar	83,83	95,40	89,77
	7302. Bulukumba	86,86	96,44	91,80
	7303. Bantaeng	75,06	85,52	80,45
	7304. Jeneponto	87,00	90,02	88,41
	7305. Takalar	88,30	96,65	91,72
	7306. Gowa	88,02	92,25	90,23
	7307. Sinjai	89,02	94,78	91,78
	7308. Maros	92,89	88,46	90,69
	7309. Pangkepene Kepulauan	90,08	90,77	90,41
	7310. Barru	98,58	93,44	96,23
	7311. Bone	89,35	89,59	89,48
	7312. Soppeng	89,56	93,25	91,45
	7313. Wajo	92,44	91,02	91,61
	7314. Sidenreng Rappang	88,70	96,63	92,69
	7315. Pinrang	90,26	95,08	92,72
	7316. Enrekang	93,94	98,13	95,82
	7317. Luwu	92,99	95,13	94,02
	7318. Tana Toraja	94,80	95,76	95,25
	7322. Luwu Utara	91,19	90,67	90,92
	7325. Luwu Timur	90,55	98,06	94,49
	7326. Toraja Utara	92,63	99,07	96,10
	7371. Makassar	96,26	97,28	96,78
	7372. Pare Pare	98,52	96,47	97,52
7373. Palopo	98,45	92,50	95,12	
Provinsi	Sulawesi Selatan	91,21	93,90	92,57

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Juli 2014

Lampiran Tabel 4

Jumlah Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014

		APS 16-18 Tahun		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
		sekolah	sekolah	Sekolah
		Mean	Mean	Mean
Kabupaten/kota	7301. Kepulauan Selayar	69,16	70,51	69,87
	7302. Bulukumba	70,27	81,09	75,50
	7303. Bantaeng	46,21	61,36	54,06
	7304. Jeneponto	71,63	54,69	62,08
	7305. Takalar	75,67	66,59	71,08
	7306. Gowa	68,88	70,96	69,81
	7307. Sinjai	68,69	71,73	70,19
	7308. Maros	52,84	61,20	57,40
	7309. Pangkepene Kepulauan	61,71	79,42	70,36
	7310. Barru	75,22	77,68	76,52
	7311. Bone	63,55	51,66	58,27
	7312. Soppeng	79,37	75,36	77,13
	7313. Wajo	57,59	72,79	64,93
	7314. Sidenreng Rappang	54,88	70,90	62,89
	7315. Pinrang	65,89	73,97	69,65
	7316. Enrekang	70,74	92,72	81,54
	7317. Luwu	71,01	83,54	77,68
	7318. Tana Toraja	77,80	82,90	80,14
	7322. Luwu Utara	68,42	71,48	69,92
	7325. Luwu Timur	62,19	68,22	64,77
	7326. Toraja Utara	79,00	75,64	77,71
	7371. Makassar	68,76	73,49	71,08
	7372. Pare Pare	74,87	78,32	76,66
7373. Palopo	79,76	85,85	82,78	
Provinsi	Sulawesi Selatan	67,46	71,40	69,38

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Juli 2014

Lampiran Tabel 5

Jumlah Angka Partisipasi Sekolah 19-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014

		APS 19-24 Tahun		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
		sekolah	sekolah	Sekolah
		Mean	Mean	Mean
Kabupaten/kota	7301. Kepulauan Selayar	23,72	21,67	22,77
	7302. Bulukumba	19,02	23,76	21,75
	7303. Bantaeng	18,84	23,35	21,34
	7304. Jeneponto	17,40	13,29	15,39
	7305. Takalar	25,68	24,25	24,93
	7306. Gowa	21,85	25,09	23,40
	7307. Sinjai	25,85	19,99	22,71
	7308. Maros	20,80	20,12	20,42
	7309. Pangkepene Kepulauan	28,00	21,25	24,55
	7310. Barru	27,93	30,06	29,03
	7311. Bone	30,47	31,38	30,89
	7312. Soppeng	18,66	20,58	19,64
	7313. Wajo	26,17	22,85	24,40
	7314. Sidenreng Rappang	30,39	34,44	32,21
	7315. Pinrang	22,35	35,07	28,62
	7316. Enrekang	26,70	25,56	26,14
	7317. Luwu	26,61	27,90	27,21
	7318. Tana Toraja	36,21	43,40	39,98
	7322. Luwu Utara	19,28	20,46	19,85
	7325. Luwu Timur	26,81	21,59	24,10
	7326. Toraja Utara	29,43	37,29	33,88
	7371. Makassar	41,47	42,85	42,19
	7372. Pare Pare	34,64	38,90	36,87
7373. Palopo	29,60	52,39	42,87	
Provinsi	Sulawesi Selatan	29,21	31,20	30,23

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Juli 2014

Lampiran Tabel 6

Penduduk Laki-Laki Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

Kode	Kab/Kota	Kegiatan Utama					Total
		Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus RT	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Selayar	32.759	87	4.179	375	2.477	39.877
2	Kab. Bulukumba	113.374	1.852	5.909	1.736	6.712	129.583
3	Kab. Bantaeng	47.694	2.915	1.828	0	7.435	59.872
4	Kab. Jeneponto	99.805	3.198	1.612	0	11.219	115.834
5	Kab. Takalar	74.510	3.657	7.892	1.178	3.796	91.033
6	Kab. Gowa	179.230	5.112	11.367	1.572	23.199	220.480
7	Kab. Sinjai	63.691	954	387	550	9.136	74.718
8	Kab. Maros	82.855	4.574	10.099	980	8.038	106.546
9	Kab. Pangkep	75.939	5.154	8.818	604	10.059	100.574
10	Kab. Barru	41.310	1.593	864	2.028	9.169	54.964
11	Kab. Bone	200.562	6.170	6.984	2.325	21.056	237.097
12	Kab. Soppeng	62.890	2.068	1.216	602	9.881	76.657
13	Kab. Wajo	112.924	2.385	676	718	17.723	134.426
14	Kab. Sidrap	72.669	3.245	8.299	131	8.725	93.069
15	Kab. Pinrang	83.240	3.341	2.004	1.588	24.856	115.029
16	Kab. Enrekang	53.869	751	282	424	6.894	62.220
17	Kab. Luwu	76.861	6.307	9.607	3.014	11.472	107.261
18	Kab. Tator	61.221	2.769	5.682	320	3.361	73.335
22	Kab. Luwu Utara	78.927	2.389	74	2.168	13.777	97.335
25	Kab. Luwu Timur	67.986	3.853	304	1.326	11.151	84.620
26	Kab. Toraja Utara	52.158	2.313	7.584	458	6.898	69.411
71	Kota Makassar	307.917	33.925	73.690	16.706	34.645	466.883
72	Kota Pare-Pare	30.649	1.331	1.203	2.087	7.726	42.996
73	Kota Palopo	33.631	3.235	3.621	5.637	2.887	49.011
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>2.106.671</b>	<b>103.178</b>	<b>174.181</b>	<b>46.527</b>	<b>272.292</b>	<b>2.702.849</b>

Sumber : BPS, diolah dari data Sakernas Agustus 2012

Lampiran Tabel 7

Penduduk Perempuan Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

Kode	Kab/Kota	Kegiatan Utama					Total
		Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus RT	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Selayar	19.305	1.663	4.462	18.442	2.056	45.928
2	Kab. Bulukumba	74.881	3.389	9.527	59.810	5.607	153.214
3	Kab. Bantaeng	37.133	3.486	2.588	19.252	4.030	66.489
4	Kab. Jeneponto	56.796	3.924	345	58.417	9.114	128.596
5	Kab. Takalar	39.272	3.878	9.991	45.258	5.219	103.618
6	Kab. Gowa	93.981	6.305	12.344	111.815	13.535	237.980
7	Kab. Sinjai	48.802	2.331	648	28.611	3.359	83.751
8	Kab. Maros	51.489	4.652	11.187	44.975	4.144	116.717
9	Kab. Pangkep	37.717	4.764	8.376	55.918	7.304	114.079
10	Kab. Barru	22.673	1.616	1.957	32.740	4.443	63.429
11	Kab. Bone	121.526	5.545	12.438	113.996	24.243	277.748
12	Kab. Soppeng	35.063	4.355	1.116	42.364	8.650	91.548
13	Kab. Wajo	55.531	3.062	890	83.260	13.039	155.782
14	Kab. Sidrap	32.041	4.628	8.068	54.783	4.269	103.789
15	Kab. Pinrang	43.484	3.818	2.136	71.751	7.402	128.591
16	Kab. Enrekang	36.851	2.106	340	20.151	3.934	63.382
17	Kab. Luwu	41.806	7.682	12.364	47.165	6.046	115.063
18	Kab. Tator	44.708	2.372	7.908	14.536	2.786	72.310
22	Kab. Luwu Utara	42.657	4.051		46.270	4.745	97.723
25	Kab. Luwu Timur	33.783	5.137	757	36.304	3.920	79.901
26	Kab. Toraja Utara	37.835	2.504	8.435	18.095	2.559	69.428
71	Kota Makassar	194.391	21.671	74.905	184.753	20.264	495.984
72	Kota Pare-Pare	21.170	945	1.144	19.305	4.040	46.604
73	Kota Palopo	22.342	1.921	5.475	22.094	1.650	53.482
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>1.245.237</b>	<b>105.805</b>	<b>197.401</b>	<b>1.250.065</b>	<b>166.628</b>	<b>2.965.136</b>

Sumber : BPS, diolah dari data Sakernas Agustus 2012

Lampiran Tabel 8

Penduduk Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

Laki-Laki + Perempuan

Kode	Kab/Kota	Kegiatan Utama					Total
		Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus RT	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Selayar	52,064	1,750	8,641	18,817	4,533	85,805
2	Kab. Bulukumba	188,255	5,241	15,436	61,546	12,319	282,797
3	Kab. Bantaeng	84,827	6,401	4,416	19,252	11,465	126,361
4	Kab. Jeneponto	156,601	7,122	1,957	58,417	20,333	244,430
5	Kab. Takalar	113,782	7,535	17,883	46,436	9,015	194,651
6	Kab. Gowa	273,211	11,417	23,711	113,387	36,734	458,460
7	Kab. Sinjai	112,493	3,285	1,035	29,161	12,495	158,469
8	Kab. Maros	134,344	9,226	21,286	45,955	12,452	223,263
9	Kab. Pangkep	113,656	9,918	17,194	56,522	17,363	214,653
10	Kab. Barru	63,983	3,209	2,821	34,768	13,612	118,393
11	Kab. Bone	322,088	11,715	19,422	116,321	45,299	514,845
12	Kab. Soppeng	97,953	6,423	2,332	42,966	18,531	168,205
13	Kab. Wajo	168,455	5,447	1,566	83,978	30,762	290,208
14	Kab. Sidrap	104,710	7,873	16,367	54,914	12,994	196,858
15	Kab. Pinrang	126,724	7,159	4,140	73,339	32,258	243,620
16	Kab. Enrekang	90,720	2,857	622	20,575	10,828	125,602
17	Kab. Luwu	118,667	13,989	21,971	50,179	17,518	222,324
18	Kab. Tator	105,929	5,141	13,590	14,856	6,147	145,663
22	Kab. Luwu Utara	121,584	6,440		48,438	18,522	195,058
25	Kab. Luwu Timur	101,769	8,990	1,061	37,630	15,071	164,521
26	Kab. Toraja Utara	89,993	4,817	16,019	18,553	9,457	138,839
71	Kota Makassar	502,308	55,596	148,595	201,459	54,909	962,867
72	Kota Pare-Pare	51,819	2,276	2,347	21,392	11,766	89,600
73	Kota Palopo	55,973	5,156	9,096	27,731	4,537	102,493
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>3,351,908</b>	<b>208,983</b>	<b>371,582</b>	<b>1,296,592</b>	<b>438,920</b>	<b>5,667,985</b>

Sumber : BPS, diolah dari data Sakernas Agustus 2012

Lampiran Tabel 9

Penduduk Usia 15+ menurut Indikator Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan  
Menurut TPT dan TPAK  
Tahun 2012

Kode	Kab/Kota	Indikator AK (%)	
		TPT	TPAK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Selayar	3.25	57.57
2	Kab. Bulukumba	2.71	56.75
3	Kab. Bantaeng	7.02	64.84
4	Kab. Jeneponto	4.35	62.05
5	Kab. Takalar	6.21	59.92
6	Kab. Gowa	4.01	57.19
7	Kab. Sinjai	2.84	54.96
8	Kab. Maros	6.43	74.50
9	Kab. Pangkep	8.03	59.67
10	Kab. Barru	4.78	76.25
11	Kab. Bone	3.51	65.63
12	Kab. Soppeng	6.15	67.32
13	Kab. Wajo	3.13	68.29
14	Kab. Sidrap	6.99	57.94
15	Kab. Pinrang	5.35	60.37
16	Kab. Enrekang	3.05	59.64
17	Kab. Luwu	10.55	57.57
18	Kab. Tator	4.63	56.75
22	Kab. Luwu Utara	5.03	64.84
25	Kab. Luwu Timur	8.12	62.05
26	Kab. Toraja Utara	5.08	59.92
71	Kota Makassar	9.97	57.19
72	Kota Pare-Pare	4.21	54.96
73	Kota Palopo	8.43	74.50
	Sulawesi Selatan	3.25	62.82

Sumber : BPS, diolah dari data Sakernas Agustus 2012

Lampiran Tabel 10

Jumlah, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kab/Kota  
Di Sulawesi Selatan Tahun 2012-2013

Kode	Kab/Kota	Jumlah Pend.Miskin (000)		Persentase Pend.Miskin (%)		Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Selayar	16.1	18.2	12.87	14.23	247,483	261,261
2	Kab. Bulukumba	31.3	36.7	7.82	9.04	243,437	249,131
3	Kab. Bantaeng	15.9	18.9	8.89	10.45	195,810	200,302
4	Kab. Jeneponto	57.5	58.1	16.58	16.52	256,214	265,921
5	Kab. Takalar	26.4	29.3	9.59	10.42	246,782	253,415
6	Kab. Gowa	54.6	61.0	8.05	8.73	272,310	278,068
7	Kab. Sinjai	21.5	24.3	9.28	10.32	202,565	215,481
8	Kab. Maros	40.9	43.1	12.55	12.94	254,121	278,520
9	Kab. Pangkep	51.8	56.4	16.62	17.75	222,310	235,875
10	Kab. Barru	15.5	17.5	9.28	10.32	232,085	246,303
11	Kab. Bone	88.8	87.7	12.25	11.92	229,128	233,943
12	Kab. Soppeng	20.4	21.3	9.12	9.43	196,508	202,666
13	Kab. Wajo	30.3	31.9	7.83	8.17	226,640	238,194
14	Kab. Sidrap	16.7	17.9	6.00	6.30	213,350	235,406
15	Kab. Pinrang	27.9	32.1	7.82	8.86	208,563	221,717
16	Kab. Enrekang	28.2	29.7	14.44	15.11	221,101	235,269
17	Kab. Luwu	45.2	52.0	13.33	15.10	217,802	229,799
18	Kab. Tana Toraja	28.6	31.3	12.72	13.81	208,436	217,981
22	Kab. Luwu Utara	41.1	46.2	14.02	15.52	224,241	240,721
25	Kab. Luwu Timur	19.7	22.2	7.71	8.38	218,148	231,447
26	Kab. Toraja Utara	36.1	36.8	16.27	16.53	330,106	334,931
71	Kota Makassar	69.2	66.4	5.02	4.70	250,542	273,231
72	Kota Pare-Pare	7.4	8.6	5.58	6.38	234,029	248,270
73	Kota Palopo	14.8	15.5	9.46	9.57	225,306	224,562
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>805,9</b>	<b>863,2</b>	<b>9,82</b>	<b>10,32</b>	<b>195,627</b>	<b>217,547</b>

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas

---

#### DAFTAR PUSTAKA

- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2014), Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2014), Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013, Sul Sel
- BPS , Provinsi Sulawesi Selatan, (2014), Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2014), Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2014), Hasil Sensus Penduduk 2010 Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010, Sul-Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2013), Indikator Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2013, Sul Sel
- BPS, Provinsi Sulawesi Selatan, (2014), Percepatan penyediaan Data Statistik dalam rangka Alokasi Dana Perimbangan Daerah, Penduduk Pertengahan tahun 2010-2014 Provinsi Sulawesi Selatan, 2014
- BPS, Kota Makassar, Makassar Dalam Angka Kota Makassar, 2011-2014, Makassar
- BPS, Kota Makassar, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar, 2011-2014, Makassar